



KONFLIK CINA-JAWA DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 1995

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial

Oleh:

Ribut Tulus Rahayu

NIM 3111412010

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

JURUSAN SEJARAH FAKULTAS

ILMU SOSIAL UNIVERSITAS

NEGERI SEMARANG

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia
Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 29 Mei 2016

Pembimbing Skripsi I

Drs. Jayusman, M. Hum.
NIP. 196308151988031001

Pembimbing Skripsi II

Drs. Ibtu Sodik, M. Hum.
NIP. 196312151989011001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Hamdan Tri Atmaja, M. Pd.
NIP. 196404051989011001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Juni 2016

Penguji I



Dra. Hj. Ufi Saragwati, M. Hum.
NIP. 196608061990022001

Penguji II



Drs. Jayusman, M. Hum.
NIP. 196308151988031001

Penguji III



Drs. Ibnu Sodik, M. Hum.
NIP. 196312151989011001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

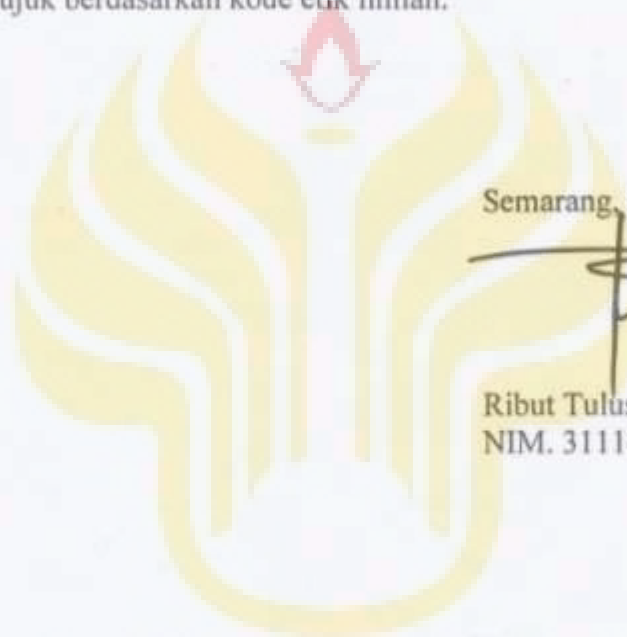


Drs. Muli Solehatul Mustofa, M.A.
NIP. 196308021988031001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, 24 Mei 2016

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line followed by a vertical line that curves to the right and then loops back down.

Ribut Tulus Rahayu
NIM. 3111412010

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan jadikan dirimu budak uang” (Penulis).

“Dunia ini bukan pabrik pengabul do'a” (by Anonim).

Skripsi ini sebagai hasil kesabaran dan kerja keras saya, yang saya persembahkan kepada:

- ❖ Bapak saya Hartono dan ibu saya Nur Kamah tercinta, yang selalu memberikan segala hal untuk saya.
- ❖ Kakak-kakakku tersayang yang selalu mendukung saya.
- ❖ Segenap dosen dan guru, terima kasih atas ilmu yang diberikan.
- ❖ Semua sahabat saya, terima kasih untuk semua kenangan yang kalian bagi bersama saya.



SARI

Ribut Tulus Rahayu. 2016, *Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995*. Skripsi. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Jayusman, M. Hum. Pembimbing II Drs. Ibnu Sodik, M. Hum.

Kata Kunci: Konflik, Cina, Jawa.

Konflik sosial sering terjadi di Indonesia dan mengalami peningkatan secara pesat menjelang berakhirnya Orde Baru. Salah satunya terjadi di Kota Pekalongan pada tahun 1995. Konflik ini melibatkan etnis Tionghoa (Cina) dan pribumi (etnis Jawa). Kondisi masyarakat Pekalongan mayoritas beragama Islam dengan tingkat religiusnya tinggi. Saat seorang Tionghoa dikabarkan telah menyobek Al Qur'an, hal tersebut kemudian memicu kerusuhan yang terjadi selama tiga hari.

Dalam penelitian ini dirumuskan tiga masalah yaitu: latar belakang dan kronologi konflik, dampak konflik, dan upaya penanganan konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apa yang melatarbelakangi dan kronologi terjadinya konflik, dampak konflik serta upaya penanganan konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995. Manfaat dari hasil penelitian konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995 diharapkan dapat memberikan informasi tentang hubungan etnis Tionghoa (Cina) dan etnis Jawa di Kota Pekalongan khususnya, dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca pada umumnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup empat hal yaitu, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial di Kota Pekalongan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial yang menimbulkan konflik laten di masyarakat Kota Pekalongan. Konflik laten tersebut akhirnya muncul ke permukaan saat seorang etnis Tionghoa menyobek Al Qur'an dan menimbulkan kemarahan etnis Jawa yang beragama Islam sehingga menimbulkan kerusuhan. Belakangan diketahui bahwa pelaku penyobekan merupakan penderita gangguan jiwa. Konflik tersebut terjadi selama mulai 22 Nov. 1995 dan memuncak pada 24 Nov. 1995. Konflik tersebut telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi di masyarakat Pekalongan. Penanganan konflik dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan bersama aparat keamanan, Muspida, dan tokoh masyarakat menghimbau agar masyarakat Kota Pekalongan yang beragama Islam tidak terpancing emosi dan melakukan tindakan anarkis. Beberapa hari kemudian pelaku penyobekan Al Qur'an meninggal saat berada di sel tahanan. Setelah kejadian tersebut, konflik akhirnya berakhir dan keadaan kembali normal.

ABSTRACT

Rahayu, Ribut Tulus. 2016, *Chinese-Javanese Conflict in Pekalongan City in 1995*. Thesis. Department of History, Faculty of Social Sciences, State University of Semarang. Lecture I Drs. Jayusman, M. Hum. Lecture II Drs. Ibn Sodik, M. Hum.

Keywords: Conflict, Chinese, Javanese.

Social conflicts often occur in Indonesia and has increased rapidly towards the end of Orde Baru. One of them occurred in Pekalongan 1995. This conflict involves Chinese and Javanese. Moslem Pekalongan society have a good religious. When a Chinese reportedly had torn the Qur'an, it is then triggered riots that occurred during the three days.

In this study, formulated three issues, namely: the background and chronology of the conflict, the impact of conflict, and conflict resolution conflict between Chinese and Javanese in Pekalongan 1995. The benefits of the research results conflict Chinese-Javanese in Pekalongan 1995 is expected to provide increase knowledge for the general reader.

This study uses historical research that includes four issues, heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data collection techniques in this study include literature study, observation, interviews, and documents.

The results showed that the social conflict in Pekalongan was motivated by several factors, political factors, economic factors and social factors that given rise to latent conflict in community Pekalongan. the latent conflict finally came to the surface when a Chinese tore the Qur'an and incurring the wrath of Javanese Moslem sparking a riot. Later revealed that the perpetrator are people with mental disorders. The conflict occurred during November 22 1995 and peaked on November 24 1995. The conflict has caused social and economic impact on society Pekalongan. conflict resolution is done by government of Pekalongan with security forces, dan community leaders that telled people who are Moslem Pekalongan not provoked emotions and do anarchy. A few days later, the perpetrator Qur'an died while in detention cells. After the incident, the conflict finally ends and situation returns to normal.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, serta melimpahkan Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa bersyukur kepada-Nya. Rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena telah memberikan kemudahan, kelancaran dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan pada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Prof. Dr. Fatkhur Rohman, M. Hum, selaku Raktor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh Solehatul Mustofa, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Hamdan Tri Atmaja, M. Pd. selaku Ketua Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Jayusman, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan, dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Drs. Ibnu Sodiq, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang juga senantiasa memberikan bimbingan, dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini

6. Segenap Dosen Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
7. Narasumber dan segenap pegawai Kantor Daerah Kota Pekalongan, terima kasih atas informasi dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan manfaat serta kontribusi di dunia pengetahuan.

Semarang, Mei 2016

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI.....	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	23
BAB II LATAR BELAKANG DAN KRONOLOGI KONFLIK CINA-JAWA DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 1995 ..	34
A. Latar Belakang Politik Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 1995.....	35
B. Latar Belakang Ekonomi Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 1995.....	40
C. Latar Belakang Sosial Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 1995.....	47
D. Pemicu Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan	

	Tahun 1995.....	52
E.	Kronologi Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995.....	58
BAB III	DAMPAK KONFLIK CINA-JAWA DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 1995	76
A.	Dampak Politik Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995.....	63
B.	Dampak Sosial Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995.....	66
C.	Dampak Ekonomi Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995.....	70
BAB IV	UPAYA PENANGANAN KONFLIK CINA-JAWA DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 1995.....	76
A.	Upaya Penanganan Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995 Dalam Jangka Pendek	79
1.	Upaya Penanganan Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995 Pasca Kerusuhan Rabu 22 November 1995	79
2.	Upaya Penanganan Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995 Pasca Kerusuhan Jum'at 24 November 1995	83
3.	Upaya Penanganan Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995 Pasca Kematian Yoe Sing Yoeng Senin 27 November 1995	87
B.	Upaya Penanganan Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995 Dalam Jangka Panjang	90
BAB V	PENUTUP	93
	DAFTAR PUSTAKA.....	101
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	107

DAFTAR SINGKATAN

PDTI	: Partai Demokrat Tionghoa Indonesia
Baperki	: Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia
Bakom	: Badan Komunikasis
CSIS	: <i>Centre of Strategic and International Studies</i>
LPKB	: Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa
GKBI	: Gabungan Koperasi Batik Indonesia
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
FPBI	: Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data Kerusakan Akibat Kerusakan di Wilayah Pekalongan Timur dan Selatan.....	74
Tabel 3.2. Data Kerusakan Akibat Kerusakan di Wilayah Pekalongan Barat dan Utara.....	74
Tabel 3.3. Data Kendaraan Yang Mengalami Pengerusakan Dan Pembakaran.....	75



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:	DAFTAR GAMBAR	108
LAMPIRAN 2:	TRANSKRIP WAWANCARA ALWI	115
LAMPIRAN 3:	TRANSKRIP WAWANCARA ABU	120
LAMPIRAN 4:	TRANSKRIP WAWANCARA SABARI	122
LAMPIRAN 5:	TRANSKRIP WAWANCARA SUARDAWA	124
LAMPIRAN 6:	TRANSKRIP WAWANCARA MACHMUD	126
LAMPIRAN 7:	TRANSKRIP WAWANCARA EDDY	128
LAMPIRAN 8:	TRANSKRIP WAWANCARA DIRHAMSyah	131
LAMPIRAN 9:	LAPORAN SITUASI DAERAH BULAN NOVEMBER 1995 Hal. 5.....	133
LAMPIRAN 10:	SURAT KETERANGAN RUMAH SAKIT JIWA MAGELANG.....	134
LAMPIRAN 11:	UNDANGAN RAPAT PEMBAHASAN MASALAH JALAN HAYAM WURUK.....	135
LAMPIRAN 12:	LAPORAN DEPARTEMEN AGAMA KODYA PEKALONGAN.....	136
LAMPIRAN 13:	MAJALAH GATRA, 2 DESEMBER 1995	138
LAMPIRAN 14:	MAJALAH GATRA, 9 DESEMBER 1995	142
LAMPIRAN 15:	REPUBLIKA ONLINE, 27 NOVEMBER 1995.....	145
LAMPIRAN 16:	SUARA MERDEKA NO. 277 EDISI JUM'AT 24 NOVEMBER 1995.....	150
LAMPIRAN 17:	SUARA MERDEKA NO. 278 EDISI SABTU 27 NOVEMBER 1995.....	151

LAMPIRAN 18: SUARA MERDEKA NO. 280 EDISI SENIN 27 NOVEMBER 1995	152
LAMPIRAN 19: SUARA MERDEKA NO. 281 EDISI SELASA 28 NOVEMBER 1995.....	154
LAMPIRAN 20: SUARA MERDEKA NO. 282 EDISI RABU 29 NOVEMBER 1995	156
LAMPIRAN 21: SUARA MERDEKA NO. 283 EDISI KAMIS 30 NOVEMBER 1995.....	157
LAMPIRAN 22: SUARA MERDEKA NO. 285 EDISI SABTU 2 DESEMBER 1995.....	158
LAMPIRAN 23: SUARA MERDEKA NO. 286 EDISI MINGGU 3 NOVEMBER 1995.....	159



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia seringkali disebut sebagai masyarakat majemuk dengan pandangan pluralisme karena keanekaragaman masyarakat dan kebudayaannya, setidaknya pada masa lampau, kurang berinteraksi satu sama lain karena faktor geografis kepulauan (Syarifuddin, 2006: 4). Lebih lanjut Syarifuddin menjelaskan bahwa pluralisme merupakan pemahaman atau cara pandang keanekaragaman yang menekankan entitas perbedaan setiap masyarakat satu sama lain dan kurang memperhatikan interaksinya. Kemudian menurut Mark Lopez (dalam Coppel, 2003: 13) masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan multibahasa yang beranekaragam dilihat dari sudut pandang etnis dan budaya. Dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan Mark bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari ras dan suku yang berbeda-beda sehingga masyarakat Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Dari pernyataan Syarifuddin dan Mark Lopez maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural dengan berbagai etnis, suku dan bahasa (Syarifuddin, 2006; Coppel, 2003).

Keadaan masyarakat Indonesia yang plural, apabila tidak dikelola dengan baik hubungan masyarakatnya, maka akan rawan terhadap konflik. Dalam pengelolaan keragaman tersebut, pemerintah merupakan pihak yang memiliki peran penting, namun apabila pemerintah tidak dapat mengelola, atau bahkan

menerapkan kebijakan yang dapat menyebabkan kecemburuan sosial didalam masyarakat, maka kebijakan tersebut harus diperbaiki. Hal ini yang terjadi di Indonesia menyangkut etnis Tionghoa dan pribumi pada masa Orde baru.

Ketika Soeharto muncul setelah aksi G30S yang gagal pada tahun 1965, kebijakan terhadap kelompok etnis Tionghoa mengalami perubahan. Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menaruh curiga atas hubungan-hubungan yang dijalin oleh komunitas Tionghoa dengan Republik Rakyat Tiongkok hal ini dibahas dalam seminar yang dilakukan oleh Angkatan Darat I yang diadakan pada bulan Mei 1965. Dalam seminar tersebut dikatakan bahwa:

“untuk mengembalikan sebutan umum kepada pemakaian yang telah lazim terdapat di mana, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri, dan dalam berbagai bahasa, sebagai sebutan bagi negara dan warga-warga yang bersangkutan, tetapi terutama untuk menghilangkan rasa inferior pada bangsa kita sendiri, sebaliknya menghilangkan rasa superior pada golongan yang bersangkutan di dalam negara kita, maka patut pula kami laporkan bahwa seminar pada golongan yang bersangkutan di dalam negeri kita, maka patut pula kami laporkan bahwa seminar telah memutuskan untuk kembali memakai penyebutan bagi “Republik rakyat Tiongkok” dan warga-negaranya, diubah menjadi “Republik Rakyat Cina” dan warga negara Cina. Hal ini dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari segi historis dan sosiologis” (Wibowo (ed.) 2010: 77).

Dokumen itu sangat penting karena merupakan sumber dari seluruh peraturan diskriminatif terhadap etnik Tionghoa. Dalam keputusan ini, Angkatan Darat secara jelas menyatakan bahwa di Indonesia terdapat dua golongan penduduk, yang satu bangsa Indonesia atau pribumi dan satu lagi bangsa Tionghoa. Dikatakan bahwa bangsa Indonesia mempunyai rasa inferior terhadap bangsa Tionghoa, sedangkan bangsa Tionghoa memiliki rasa superior terhadap

bangsa Indonesia. Jadi, untuk menghapuskan rasa inferior bangsa Indonesia, seminar Angkatan Darat mengambil keputusan untuk mengganti kata “tionghoa” dan “tiongkok” yang telah lazim, menjadi “Cina” yang dianggap mengandung makna penghinaan oleh orang Tionghoa sendiri, tidak saja di negeri Tiongkok, tetapi juga di Indonesia. Latar belakang keputusan ini adalah kemarahan terhadap RRC yang bersimpati pada PKI pada waktu itu ikut berperan. Namun prasangka etnis di kalangan elite Indonesia yang waktu itu berkuasa merupakan satu sebab yang tidak bisa diabaikan (Starlitas dkk (ed),: 453-454).

Akibat dari peristiwa di atas pemerintah Orde Baru melakukan diskriminasi dengan menggunakan kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa. Kebijakan tersebut diterapkan dalam semua bidang, antara lain dalam bidang politik, pemerintah melarang semua organisasi sosio-politik Tionghoa. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Indonesia menutup semua sekolah Tionghoa yang pro-Beijing. Semua anak Tionghoa hanya dapat belajar di Sekolah Indonesia, selain itu penggunaan bahasa Tionghoa pun di batasi penggunaannya oleh pemerintah. Lopulalan dan Tukan (dalam Hermana, 2015: 4) mengatakan bentuk diskriminasi yang dilakukan adalah dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur kedudukan atau eksistensi Etnis Tionghoa di Indonesia, antara lain adalah Instruksi Presidium Kabinet RI No. 37/IN/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Tionghoa, Surat Edaran Presidium Kabinet RI No. SE 36/Pres/Kab/6/1967 tentang Masalah Tionghoa, Instruksi Presiden No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Tionghoa, Instruksi Presiden No. 15/1967 tentang Pembentukan Staff Khusus Urusan Tionghoa,

Instruksi Mendagri No. 455.2-360 tentang Penataan Klenteng, Keputusan Kepala Bakin No. 031/1973 tentang Badan Koordinasi Masalah Tionghoa Surat Keputusan (SK) Meteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/1978 tentang Pelarangan Impor, Penjualan dan Perdagangan Terbitan Dalam Bahasa dan Aksara Tionghoa, Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 6/37/UPKI1973 tentang Kredit Investasi Untuk Golongan Pengusaha Kecil, Surat Edaran Menteri Penerangan No. 02/SE/Dit tentang Larangan Penerbitan dan Percetakan Tulisan atau Iklan Beraksara dan Berbahasa Tionghoa (Hermana, 2015: 4).

Ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik di dalam masyarakat dapat menimbulkan konflik antar kelompok. Konflik antar etnis telah terjadi di hampir semua wilayah Indonesia, namun di penghujung Orde Baru konflik yang terjadi semakin meningkat jumlahnya. Beberapa peristiwa kerusuhan sosial yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 1994-1997 diantaranya terjadi di Sanggau Ledo, Kalimantan Barat pada 1 Januari 1997, konflik terjadi dipicu perkelahian antara pemuda etnis Dayak dengan etnis Madura pada malam penyambutan tahun baru yang berbuntut pada aksi balas dendam. Konflik di Ambon, Sulawesi Selatan, yang terjadi pada 19 Januari 1998 dan dipicu oleh perkelahian antara pengemudi kendaraan umum dengan penumpang yang akhirnya menjadi perkelahian antar agama, kemudian di Sambas, Kalimantan Barat, konflik yang terjadi pada 21 Februari 1999 tersebut bermula dari seorang penumpang angkutan umum yang tidak mau membayar, sehingga terjadi perkelahian yang melukai sopir dari etnis Dayak yang dilakukan oleh penumpang etnis Madura. Kejadian tersebut berbuntut pada aksi balas dendam etnis Dayak (Rahardjo, 2005: 782).

Konflik sosial juga terjadi di Batam, Riau, pada 27 Juli 1999 peristiwa tersebut di picu oleh pertikaian etnis yang disebabkan perebutan penumpang antara warga etnis Flores dengan warga etnis Batak. Pertikaian tersebut akhirnya menjadi kerusuhan massa antara kedua kelompok etnis. Di Wamena, Irian Jaya, konflik terjadi pada 6 Oktober 2000 dipicu aksi penurunan bendera Bintang Kejora oleh aparat Brimob yang mengakibatkan kemarahan penduduk asli Papua, kemudian di Sampit, Kalimantan Tengah, pada 18 Februari 2001, kali ini konflik dipicu oleh peristiwa dibunuhnya empat anggota dari keluarga etnis Madura, diduga pelakunya adalah orang Dayak, ratusan etnis Madura kemudian menyerang satu keluarga etnis Dayak. Ribuan warga etnis Dayak, bahkan dai pedalaman memasuki kota untuk melakukan pembersihan etnis Madura (Rahardjo, 2005: 783).

Konflik sosial yang terjadi juga melibatkan warga etnis Tionghoa, baik sebagai faktor pemicu terjadinya kerusuhan atau hanya sebagai imbas dari kerusuhan. Beberapa diantaranya terjadi di Situbondo, Jawa Timur, pada 10 Oktober 1995, kerusuhan terjadi dipicu karena adanya perbedaan pendapat antara santri muda dengan seorang kiai senior, karena dianggap melecehkan agama, masyarakat menuntut santri muda itu dihukum mati. Namun, pengadilan hanya memvonis lima tahun penjara, sehingga terjadi amuk massa dengan membakar gereja dan penjarahan toko milik etnis Tionghoa. Di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 15 September 1997, berawal dari terbunuhnya seorang anak berusia sembilan tahun oleh seorang etnis Tionghoa pengidap sakit jiwa. Akibatnya massa yang marah, kemudian menyerang dan membakar rumah, toko, tempat hiburan

milik etnis Tionghoa dan Vihara. Kerusuhan massal di Jakarta, yang terjadi pada 13 dan 14 Mei 1998 yang kemudian diikuti aksi penjarahan dan pembakaran tempat-tempat bisnis serta pelecehan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa (Rahardjo, 2005: 782).

Salah satu kerusuhan yang melibatkan etnis Tionghoa dan pribumi terjadi di Kota Pekalongan. Pekalongan merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Terdapat tiga kelompok etnis besar yang tinggal di Kota Pekalongan yaitu, kelompok masyarakat etnis pribumi, kelompok masyarakat etnis Tionghoa dan kelompok masyarakat etnis Arab. Dari ketiga kelompok etnis masyarakat tersebut, masyarakat pribumi merupakan kelompok masyarakat yang jumlahnya paling besar.

Kota Pekalongan dikenal sebagai kota santri, yaitu kota dengan tingkat religiusnya yang tinggi, tercatat pada Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan hingga tahun 1995 terdapat 71 buah masjid dan 562 mushola, selain itu terdapat banyak pondok pesantren yang berdiri terdapat 10 buah dengan 1.414 santri. Dibandingkan dengan jumlah gereja di Kota Pekalongan yang berjumlah 10, Pura 1, Vihara 4, dan Klenteng 1, jumlah rumah ibadah umat Muslim sangat banyak (BPS Kota Pekalongan 1995). Keadaan sosial masyarakat Kota Pekalongan dengan tingkat religius yang tinggi tersebut mengakibatkan didaerah ini rentan sekali terhadap isu yang berhubungan dengan agama. Salah satu kerusuhan di Kota Pekalongan yang diakibatkan oleh isu keagamaan adalah kerusuhan yang terjadi di Jalan Hayam Wuruk pada tanggal 22 November 1995 dan mencapai puncaknya pada tanggal 24 November 1995.

Kerusuhan tersebut dipicu oleh seorang warga etnis Tionghoa yang dikabarkan merobek dan mengencingi Al Qur'an pada hari Rabu tanggal 22 November 1995. Berita yang menyebar tersebut mengakibatkan warga etnis Jawa yang beragama Islam marah dan melampiaskannya dengan melempari toko-toko dan rumah-rumah milik etnis Tionghoa di sepanjang Jalan Hayam Wuruk yang merupakan tempat penyobekan Kitab Suci Al Qur'an dilakukan, meskipun akhirnya diketahui bahwa pelaku penyobekan merupakan penderita gangguan jiwa yang belum lama keluar dari rumah sakit jiwa, namun kerusuhan masih terjadi dan menimbulkan dampak pada kehidupan masyarakat Kota Pekalongan, yaitu dampak politik, ekonomi, maupun sosial. Kerusuhan yang terjadi selama beberapa hari tersebut menjadi isu nasional, karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada kerusuhan yang melibatkan etnis Jawa dan etnis Tionghoa di Kota Pekalongan pada tahun 1995 untuk mengetahui kebenaran dari kerusuhan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang melatarbelakangi dan bagaimana kronologi terjadinya konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan pada tahun 1995?
2. Dampak apa yang ditimbulkan setelah terjadinya konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan pada tahun 1995?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menangani konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan pada tahun 1995?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui latar belakang serta kronologi terjadinya konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995.
2. Mengetahui dampak yang ditimbulkan setelah terjadinya kerusuhan di Kota Pekalongan tahun 1995.
3. Mengetahui apa saja upaya yang dilakukan pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menangani konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian “Konflik Cina-Jawa Di Kota Pekalongan Tahun 1995” diharapkan dapat bermanfaat secara praktis dan teoritis. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan tentang kerusuhan yang melibatkan warga pribumi dan warga keturunan Tionghoa di Kota Pekalongan pada tahun 1995.
 - b. Bagi Pembaca dapat menambah pengetahuan tentang kerusuhan yang melibatkan warga pribumi dan warga keturunan Tionghoa di Kota Pekalongan pada tahun 1995.
2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang hubungan etnis Tionghoa dan etnis Jawa di Kota Pekalongan pada tahun 1995.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian sejarah, peneliti harus membatasi ruang lingkup yang akan dikaji. Hal ini bertujuan agar pembahasan tidak terlalu meluas dan hasil dari penelitian lebih terfokus kepada satu pembahasan masalah. Ruang lingkup dalam penelitian ini terdapat dua lingkup penelitian yaitu ruang lingkup spasial dan ruang lingkup temporal.

Ruang lingkup spasial adalah batasan tempat untuk penelitian. Batasan tempat dalam penelitian ini adalah Kota Pekalongan, dimana pada tahun 1995 tepatnya di Jalan Hayam Wuruk terjadi kerusuhan sebagai luapan amarah warga etnis Jawa kepada warga etnis Tionghoa akibat kasus penyobekan Kitab Suci Al Qur'an yang dilakukan warga etnis Tionghoa dan dianggap oleh warga etnis Jawa yang mayoritas beragama Islam telah menghina agama Islam. Kerusuhan tersebut dikabarkan menjalar hingga keluar Kota Pekalongan, sehingga peneliti membatasi penelitian ini di Kota Pekalongan sebagai lokasi kajian penelitian.

Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu yang akan dikaji oleh peneliti. Peneliti memilih tahun 1995 sebagai batasan waktu kajian penelitian. Tahun 1995 dipilih karena konflik yang dikaji oleh peneliti terjadi pada tanggal 22 November 1995 hingga 24 November 1995.

F. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti menelusuri sumber pustaka, penelitian yang akan dilakukan belum pernah dilakukan sebelumnya. Terdapat beberapa karya ilmiah yang ditemukan oleh peneliti mengenai konflik sosial antara etnis Tionghoa dan etnis pribumi, namun pokok bahasan yang diambil berbeda dengan pokok bahasan yang akan peneliti lakukan.

Wong Jawa dan Wong Cina: Liku-liku hubungan sosial antara etnis Tionghoa dengan Jawa di Solo tahun 1911-1998. Wasino. 2006

Dalam buku ini dijelaskan mengenai pasang surut hubungan etnis Tionghoa dan etnis Jawa atau pribumi di Solo. Kota Solo atau Surakarta secara kultur merupakan daerah *kuthanegara* atau *kuthagara* yang dalam tradisi ketatanegaraan Mataram merupakan pusat ibu kota dan setiap tahunnya selalu didatangi rakyat ketika terjadi upacara Sekaten. Pada masa itu sistem sosial yang dianut sistem feodal, dan konflik yang bersifat vertikal tidak pernah muncul ke permukaan. Konflik yang terjadi pada umumnya adalah konflik horizontal yaitu terjadi di kalangan *elite* yang memperebutkan kekuasaan, atau konflik antar rakyat dalam persoalan tanah. Akibat konflik di tingkat *elite*, yakni Mangkunagara dan Sri Susuhunan Pakubuwana II, wilayah Surakarta pada tahun 1755 terbagi menjadi dua yakni Kasunana dan Mangkunagaran.

Hubungan harmonis antara etnis Cina dan Jawa mulai terganggu setelah pemerintah Belanda berkuasa. Kebijakan Pemerintah Kolonial menimbulkan jarak antara orang Jawa dan orang Cina bahkan bibit konflik. Kurang lebih pada tahun

1850 tingkatan strata berdasarkan ras dinyatakan dalam undang-undang. Adapun strata sosial berdasarkan Ras itu adalah:

1. Penduduk kompeni
2. Penduduk yang merdeka (orang-orang Kristen)
3. Orang-orang Timur Asing (Cina,India,Arab)
4. *Inlander* (pribumi) (Wasino, 2006: 25).

Konflik antara Cina Jawa yang tadinya terpendam pada tahun 1912 muncul kepermukaan dengan terjadinya bentrokan antara golongan penduduk Cina dan anggota Sarikat Islam. Sarikat Islam merupakan organisasi yang terbentuk akibat monopoli perdagangan Cina dan didirikan oleh pengusaha batik. Pada tahun 1980 konflik muncul, diawali dengan konflik individual yaitu seorang pelajar pribumi menyerempet seorang Cina yang kemudian terjadi adu mulut dan saling menyalahkan, peristiwa ini terjadi pada tanggal 19 November 1980. Kerusuhan terjadi pada tanggal 20 November 1980 sampai tanggal 23 November 1980. Aksi kerusuhan berupa pelemparan batu, pembakaran rumah, toko dan kendaraan bermotor. Konflik juga muncul pada tahun 1998 namun etnis Cina lebih sebagai sasaran amuk massa pada saat demonstrasi untuk menurunkan Soeharto sebagai presiden. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa 14 Mei 1998, karena terjadi pada tanggal 14 Mei 1998.

Hubungan pasang surut etnis Tionghoa dan etnis Jawa di Solo merupakan salah satu akibat dari kurangnya asimilasi antar etnis di daerah tersebut. Etnis Jawa menganggap bahwa etnis Cina sombong dan tidak mau bergaul dengan

mereka. Etnis Cina selalu menikahkan anak mereka dengan sesama Cina agar kecinaannya tetap terjaga, apabila harus menikah dengan orang Jawa maka orang Jawa itu adalah pihak wanita. Etnis Cina menganggap bahwa orang Jawa adalah orang yang malas, dan orang Jawa sangat tidak suka dengan sebutan itu. Orang Jawa menganggap bahwa uang bukan segalanya karena itu orang Jawa tidak terlalu mementingkan uang. Namun, hubungan Cina-Jawa masih berjalan baik, karena kebutuhan perdagangan ataupun yang lainnya. Beberapa etnis Tionghoa mulai membaaur dengan etnis Jawa.

Alasan peneliti memilih buku ini sebagai tinjauan pustaka adalah mengetahui sistem penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini, yang kemudian digunakan peneliti sebagai panduan dalam penulisan skripsi ini. Berbeda dengan buku karangan Wasino yang membahas konflik di Solo, dalam skripsi ini peneliti akan membahas tentang konflik yang ada di Kota Pekalongan.

Stratifikasi Etnik: Kajian Mikro Sosiologi Interaksi Etnis Jawa dan Cina.

Agus Salim. 2006.

Buku ini merupakan hasil pengembangan teori sosiologi untuk menerangkan hubungan multikultural dalam masyarakat Indonesia, khususnya berdasarkan sejumlah teori yang sudah menjadi *mainstream* dalam sosiologi multikultural. Dalam buku ini, dibahas mengenai hubungan sosial pada masyarakat multikultural yang kemudian timbul konflik antara pihak dominan dan minoritas. Indonesia memiliki keberagaman etnik dari Sabang sampai Merauke, masing-masing etnis memiliki perilaku budayanya sendiri yang hidup

berkembang dengan wajar dan alamiah dalam bentuk-bentuknya yang spesifik. Masing-masing etnis saling berinteraksi, memiliki mobilitas yang kuat karena kebutuhan ekonomi dalam jalur perdagangan antar pulau dan juga jalur penyebaran tenaga kerja. Masing-masing etnis kemudian terlibat dalam pola interaksi yang intensif yang menghasilkan tata pergaulan masyarakat yang beragam dikenal sebagai "*hetero cultural society*". Tekstur etnik di Nusantara makin disadari dengan munculnya konflik antar etnis baik dalam skala lokal maupun secara regional, sebagai contoh konflik antara masyarakat Aceh dengan etnis Jawa, konflik etnis Madura dengan etnis Dayak dan Melayu, konflik etnis Jawa dengan Cina dan konflik antara etnis Jawa dan etnis Papua.

Isi dari buku ini juga menunjukkan bahwa baik keluarga Jawa maupun Cina tidak dibedakan berdasarkan unit-unit etnik yang lebih spesifik. Keluarga etnis Cina dalam penelitian ini dianggap sebagai satu unit masyarakat yang memiliki dan mendukung perilaku kebudayaan dari etnis Cina, meskipun pada kenyataannya, sebagai keturunan diaspora mereka dapat dibedakan berdasarkan unit-unit etnik yang lebih spesifik. Demikian pula halnya dengan kebudayaan Jawa yang berasal dari etnis Jawa, dalam penelitian ini tidak dapat dibedakan asal-usul daerahnya, tetapi mereka secara pasti mempresentasikan sebuah perilaku dari budaya Jawa.

Alasan peneliti menggunakan buku ini sebagai tinjauan pustaka adalah buku ini mengulas hubungan etnis Jawa dan Cina yang berkembang pada bidang pendidikan multikultural di Kota Semarang. Berbeda dengan Agus Salim, meskipun peneliti mengkaji tentang hubungan sosial etnis Jawa dan Cina, namun

peneliti lebih menekankan hubungan mereka pada kehidupan sosial etnis Jawa dan Cina di Kota Pekalongan.

Konflik Antaretnik Di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa.

Achmad Habib. 2004.

Buku ini mengkaji tentang konflik Cina-Jawa yang ada di Pedesaan. Pedesaan sering diasosiasikan sebagai daerah yang tenteram, tanpa gejolak, punya kehidupan selaras, seimbang, saling menghormati dan atribut lainnya. Tetapi sesungguhnya, pedesaan juga menyimpan tak kalah kompleksnya permasalahan seperti yang terjadi di perkotaan. Selama ini kajian penelitian lebih menekankan pada ketidakadilan pada etnik Cina, buku ini menunjukkan bahwa ketidakadilan sebenarnya juga ditunjukkan oleh Orang Jawa.

Lokasi penelitian dalam buku ini adalah Dusun Sumberwedi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Daerah ini dikenal sebagai sentra agrobisnis, serta memiliki sejarah sosial yang cukup menarik yang berhubungan dengan interaksi sosial kelompok etnik Jawa dan etnik Cina. Kedatangan etnik Cina di Dusun Sumberwedi, awalnya untuk pembukaan tanah bekas perkebunan di sekitar daerah Sumberwedi dan juga ada yang bertujuan untuk berdagang kebutuhan rumah tangga. Berawal dari adanya pedagang keliling orang Cina di Dusun Sumberwedi dan seringnya ziarah ke makam Mbah Liung, mereka mengetahui kondisi lahan di daerah sekitar Sumberwedi yang memiliki potensi bagus. Mereka tertarik untuk mencoba membuka usaha pertanian dan akhirnya menyewa tanah dari penduduk setempat.

Hal di atas kemudian berlanjut pada interaksi antara etnis Jawa dan etnis Cina ditandai dengan adanya pernikahan orang dari etnis Jawa dengan orang etnis Cina. Keberadaan etnik Cina telah mampu mendorong proses transformasi sosial ekonomi masyarakat Dusun Sumberwedi. Jalinan interaksi sosial antara kelompok pemilik modal, yang diwakili petani Cina, dengan kelompok pemilik tanah atau buruh tani, telah membuahkan hasil yang sangat menggembirakan. Etnik Cina dalam memajukan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang dilihat dari empat perspektif, yaitu: (a) adopsi teknik pertanian (b) penerapan sistem kerja keluarga (c) manajemen pemasaran hasil produksi pertanian (d) pemenuhan kebutuhan sarana transportasi pertanian dan (e) pemberian bantuan modal pada etnik Jawa.

Namun petani Cina lebih banyak bersikap menutup diri terhadap etnik Jawa. Perlakuan para petani Cina yang selalu menjaga jarak dengan penduduk etnik Jawa, yang menjadi buruh petani Cina tersebut merupakan salah satu benih yang memicu konflik. Perlawanan yang dilakukan oleh etnik Jawa terhadap etnik Cina di Dusun Sumberwedi, justru diawali oleh para mandor petani Cina. Puncak dari konflik ini adalah pengusiran yang dilakukan oleh warga Dusun Sumberwedi terhadap petani Cina yang bernama Kiem Tek pada tahun 1973, selain itu terjadi pembunuhan terhadap anjing-anjing penjaga milik Kiem Tek. Konflik yang terjadi merupakan konflik sosial ekonomi.

Melalui buku ini peneliti mempelajari pola interaksi yang terjadi dalam masyarakat Dusun Sumberwedi antara etnis Jawa dan etnis Cina. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan isi buku, dilihat dari obyek penelitian yang dikaji.

Dinamika Radikalisme Dan Konflik Bersentimen Keagamaan Di Surakarta. Zakiyuddin Baidhawiy . 2010.

Dalam jurnal ini, pada awalnya membahas kota Solo secara umum. Awalnya Solo merupakan wilayah karesidenan yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten. Kini, Surakarta menjadi sebuah Kotamadya di bawah pemerintahan seorang walikota. Pada tahun 2007 penduduk Surakarta berjumlah 515.372 jiwa. Masyarakat Surakarta memiliki keragaman dalam hal agama, dengan jumlah penduduk beragama Islam 412.283 (73,18%), pemeluk agama Kristen Katholik sebesar 74.355 (13,19%), Kristen Protestan dengan jumlah pemeluk sebesar 69.971 (12,42%), Budha sebesar 4.605 (0,81%), dan Hindu sebesar 2.141 (0,38%). Dilihat dari data tersebut, terdapat dua komunitas agama besar yang dominan, yaitu Islam dan Kristen.

Dari tahun 1977 hingga 2007 di Surakarta, penduduk Kristen Katholik dan Protestan mengalami peningkatan (Baidhawiy, 2010: 262). Hal ini menunjukkan pada tiga dekade terakhir, terdapat kontestasi antara Islamisasi dan Kristenisasi, di mana Kristenisasi memenangi perebutan antarpemeluk agama. Antara tahun 1977 hingga 1987 jumlah pengikut Katholik dan Kristen meningkat 3,6%. Kemudian tahun 1997 hingga 2007 peningkatan jumlah pengikut Kristen Katholik hanya 0,7%, yang diperkirakan berasal dari pertambahan keturunan.

Solo sering disebut sebagai kota bersumbu pendek dan mudah terbakar. Kota ini memiliki sejarah tiga abad konflik komunal, yaitu konflik sosial dan

kekerasan sosial antara dua kelompok komunitas, di mana satu kelompok menjadi sasaran kekerasan dan amuk kelompok lainnya. Moh. Zulfan mengatakan bahwa konflik komunal semacam ini dapat terjadi atas dasar etnisitas, agama, kelas sosial, dan afiliasi politik (Baidhawiy, 2010: 263). Diperlukan analisis untuk mengakhiri kekerasan dan konflik tersebut. Banyak yang yakin bahwa kekerasan dan konflik sosial itu merupakan warisan Orde Baru, namun kekerasan dan konflik tersebut sebenarnya sudah pernah terjadi sejak masa pra Kolonial.

Sejarah kekerasan sudah mulai muncul di Surakarta sejak pertengahan abad 18. Konflik pertama yang mengawali kelahiran kota ini adalah pemberontakan etnik Cina terhadap karaton Kartasura. Laskar pemberontak etnik Cina atas Paku Buwana II, raja Mataram kala itu, telah memaksa raja melarikan diri. Karaton yang terletak sekitar 10 km di barat kota Solo itu lalu diduduki pasukan Cina pimpinan Mas Garendi, alias Sunan Kuning, pada 30 Juni 1742 (Baidhawiy, 2010: 264). Konflik muncul kembali pada akhir tahun 1911 hingga awal 1912, pada saat itu, serangkaian perkelahian jalanan antara perkumpulan Cina dan Jawa terjadi. Konflik tersebut disebabkan persaingan dagang antara orang Cina dan Orang Jawa, kemudian pada tahun 1916 konflik tersebut terulang kembali.

Pada masa pemberontakan G30S/PKI, rakyat yang setia pada Pancasila marah terhadap PKI. Perlawanan rakyat tidak hanya menjadikan PKI sebagai target, bahkan orang-orang Cina tidak lepas dari sasaran mereka. Alasannya adalah banyak dari warga keturunan Cina masa itu menjadi anggota Baperki yang

secara terang-terangan mendukung PKI. Akibatnya, para demonstran melakukan perusakan terhadap toko-toko milik Cina di kawasan Nonongan dan Coyudan pada 6 November 1966.

Konflik Cina-Jawa berikutnya terjadi pada tahun 1980 dan 1998. Pada November 1980, konflik yang terjadi dipicu oleh perkelahian antara dua pemuda Jawa dan Cina di dekat Pasar Gede. Akibat dari kerusuhan tersebut, tercatat 15 pabrik, 54 toko dan rumah rusak dibakar. Pada 14-15 Mei 1998 kembali terjadi peristiwa ini ditengarai sebagai kerusuhan terbesar sepanjang sejarah Surakarta. Kerusuhan yang terjadi selama dua hari itu, korban tewas tercatat 29 orang, 307 buah bangunan terbakar meliputi toko, plaza, show room, bank, dan 2 swalayan Matahari. Bentuk kerusuhan adalah pengerusakan dan penjarahan yang meluas di berbagai sudut kota.

Akar penyebab konflik ini tidak semata kepentingan dan persaingan ekonomi, politik, agama, etnik, dan ideologi, namun juga provokator (Baidhaw, 2010: 267). Akar penyebab yang disebut terakhir utamanya terkait dengan peristiwa Mei 1998. Saat itu, ada demonstrasi mahasiswa besar-besaran berpusat di UNS. Mereka bergerak dari kampus menuju kota Surakarta. Kira-kira 2 km sebelum Pasar Kleco, ternyata sudah terjadi bakar-bakaran dari sebelah timur jembatan Kleco hingga ke pusat kota. Para provokator ini bergerak cepat dan dalang sesungguhnya adalah para elite politik yang sedang berkelahi (Baidhaw, 2010: 268). Faktor kultural dalam konflik etnik ini adalah permusuhan *latent* antara kaum pribumi dan non-pribumi. Perangkat perilaku dan gagasan antara

etnis Jawa Solo berbeda dan bahkan kontradiktif dengan sistem kultural etnis Cina. Orang Jawa yang Muslim dan terikat oleh sejumlah nilai-nilai, berbeda dan bahkan bertentangan dengan kultur etnis Cina yang serba boleh, missal dalam hal makanan. Inilah yang kemudian melahirkan sejumlah prasangka, diskriminasi dan konflik antara dua kelompok ini lebih-lebih pada saat krisis.

Alasan peneliti memilih jurnal ini sebagai tinjauan pustaka adalah karena pembahasannya memiliki kelebihan dalam struktur penulisannya yang sistematis dan rinci. Sehingga dapat membantu peneliti dalam penulisan skripsi, meskipun kajian penelitiannya berbeda. Skripsi ini mengkaji konflik Cina-Jawa yang terjadi di Kota Pekalongan pada tahun 1995.

Akar Kerusuhan Etnis di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik Dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi. Usman Pelly. 1999.

Jurnal ini membahas akar permasalahan yang menyulut kerusuhan etnis yang merebak menjelang era reformasi (Mei 1998) di berbagai kota Indonesia tidak jauh berbeda, yaitu kesenjangan sosial ekonomi yang kronis dan akumulatif yang dikemas oleh faktor-faktor etnis dan agama. Kesenjangan sosial ekonomi tersebut disebabkan adanya perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi, rekayasa sosial dan perlakuan diskriminatif pemerintahan rezim Orde Baru dalam kesempatan berusaha dan mengembangkan diri. Kesenjangan sosial ekonomi dan perlakuan diskriminatif atas dasar “suka” atau “tidak suka” ini, dalam rangka “*class forming*” yang dipaksakan, telah menyebabkan kelompok tertentu merasa diperas dan dipinggirkan, serta diperlakukan tidak adil. Sementara kelompok lain,

secara tidak wajar menikmati hak-hak istimewa dan bersikap angkuh dan represif. Faktor-faktor etnis dan agama merupakan faktor kemas (pembingkai) dari atribut kesenjangan sosial ekonomi yang menimbulkan perlawanan kelompok yang merasa diperas dan dipinggirkan itu, sehingga potensi konflik antar kelompok yang berseteru semakin besar dan tajam (Pelly, 1999: 28).

Salah satu kerusuhan yang melibatkan etnis Cina adalah kerusuhan di Medan. Kerusuhan ini merupakan kerusuhan anti Cina yang menjalar tidak hanya ke pinggir kota, tetapi juga ke kota-kota kecil di sekitar kedua kota prima ini. Akar konflik etnis di Medan adalah kesenjangan ekonomi dan perlakuan diskriminatif antara kelompok pribumi dan warga keturunan Cina. Intensitas konflik dan durasi (lama) bentrokan dalam kerusuhan massal di Sumatera Utara relative lebih kecil, dan karena itu pula dapat lebih cepat diatasi dan dipadamkan. Penanggulangan kerusuhan di Medan dapat dilakukan lebih cepat, karena didukung oleh tiga faktor sebagai berikut (Pelly, 1999: 29):

1. Model kerusuhan yang terjadi antara kelompok pribumi dan non pribumi di Medan bersifat “klasik”, karena itu masyarakat sudah mengenal dan dapat mengidentifikasinya secara cepat dan tepat. Keadaan ini menyebabkan para provokator kehilangan inisiatif dan momen untuk mendapatkan alat pemicu guna menyalakan kerusuhan itu lebih maksimal,
2. Kerjasama para pemuka masyarakat, pemerintah, dan aparat, terutama para pemuka kelompok etnis, adat dan agama cukup baik dan tangguh. Mereka cukup banyak berperan meredakan

kemungkinan gejolak kerusuhan yang berlarut-larut, sehingga dapat terhidar dari jatuhnya korban jiwa dan kerugian material yang tidak perlu,

3. Daya akomodatif, kekuatan moral, dan independensi masyarakat di Kota Medan masih cukup kuat untuk menerima perbedaan, tantangan dan hasutan dari luar.

Selain tiga faktor tersebut, faktor lain yang cukup penting untuk membatasi kerusuhan etnis di Medan adalah perbedaan perilaku sosio-ekonomi, terutama antara kelompok kaya dan tidak kaya. Pada umumnya gaya hidup orang Medan cenderung ke arah *introvert* (melihat ke dalam). Penampilan orang Medan (kecuali non pribumi) walaupun sukses secara material, tetapi tetap “biasa-biasa saja” atau tidak terlalu menyolok dan menimbulkan kecemburuan sosial. Kelompok etnis Cina di kota Medan, sejak zaman colonial telah didisain untuk menduduki papan menengah dalam piramida sosial masyarakat Indonesia. Tragisnya, kedudukan struktural ini telah dikukuhkan kembali oleh pemerintah rezim Orde Baru, mereka berfungsi sebagai penyangga terhadap kelompok-kelompok etnis pribumi, guna mempertahankan kepentingan politik dan ekonomi rezim yang berkuasa. Oleh karena itu, krisis kepercayaan yang melanda rezim Orde Baru telah menempatkan kelompok etnis keturunan Cina sebagai “sasaran tembak” keberingasan massa.

Kerusuhan-kerusuhan etnis yang meledak sejak awal era reformasi berakar dari kesenjangan sosial-ekonomi dan merupakan protes budaya yang memberikan petunjuk kuat bahwa tatanan sosial dalam kehidupan majemuk telah dilanggar dan

dihancurkan. Kesenjangan ini merupakan usaha rekayasa *class forming* rezim pemerintah Orde Baru pendatang tertentu pada lapisan menengah dalam proses pembentuk piramida sosial masyarakat setempat. Kelompok menengah yang berfungsi sebagai penyangga ini telah memaksa kelompok etnis pribumi setempat untuk puas hidup di papan bawah, walaupun mereka merasa telah diperas dan dipinggirkan. Potensi konflik antara kedua kelompok telah memanfaatkan label etnis dan agama untuk memperluas solidaritas dan legitimasi perlawanan terhadap ketidakadilan yang dirasakan selama pemerintahan Orde Baru.

Generasi reformasi telah memberikan momentum untuk membangkitkan perlawanan dengan menggunakan label etnis dan agama tersebut. Konflik terbuka seperti di Medan, Jakarta, Sambas-Singkawang dan Ambon pada hakekatnya adalah proses sosio-kultural untuk mendapatkan keadilan dan suatu pernyataan bahwa tatanan sosial dalam kehidupan majemuk telah hancur oleh ambisi politik rezim yang berkuasa. Pemaksaan dengan suatu rekayasa sosial untuk kepentingan suatu rezim tidak akan pernah berhasil. Tidak ada sasaran tunggal (kelompok etnis tertentu) dalam kerusuhan etnis di Indonesia. kelompok etnis Cina bukanlah satu-satunya sasaran dalam kerusuhan etnis seperti yang selalu diberitakan oleh pers luar negeri.

Kelebihan dari jurnal ini adalah menjelaskan bahwa meski banyak kerusuhan yang terjadi melibatkan etnis Cina, namun beberapa daerah tidak melibatkan etnis Cina. Hal tersebut menjadi alasan peneliti menjadikan jurnal ini sebagai tinjauan pustaka, agar dalam penulisan skripsi ini, peneliti tidak hanya

melihat bahwa setiap kerusuhan antaretnis yang terjadi di Indonesia, etnis Cina selalu menjadi korban kerusuhan yang ada.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1968: 32). Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menjelaskan lebih rinci konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995, dengan didukung data-data yang ditemukan di lapangan. Berikut merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh peneliti:

1. Heuristik

Menurut terminologinya “heuristik” dari bahasa Yunani *heuristiken* = menumpulkan atau menemukan sumber. Sumber atau sumber sejarah adalah sejumlah materi sejarah yang tersebar dan teridentifikasi. Catatan, tradisi lisan, runtuan atau bekas-bekas bangunan prehistori, inkripsi kuna adalah sumber sejarah (Suhartono, 2010: 35). Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis berupa dokumen atau buku, dan sumber lisan yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Sumber penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam sumber yaitu:

1. Sumber primer

Sumber primer yaitu sumber pokok yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber dokumen dan sumber lisan. Sumber dokumen sejaman dengan kajian penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari Kantor Arsip Daerah Kota Pekalongan, Depo Arsip Suara Merdeka, dan Majalah Gatra serta Republika Online yang peneliti dapatkan dari *website*.

Sumber lisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan tujuh informan. Informan pertama adalah M. Alwi, alasan peneliti memilihnya sebagai informan adalah karena Alwi merupakan saksi utama kasus penyobekan Kitab Suci Al Qur'an yang terjadi pada rabu 22 November 1995. Informan selanjutnya adalah dua saksi mata konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995. Abu Hasan merupakan warga yang tinggal di Jalan Hayam Wuruk dan Sabari merupakan buruh angkut yang bekerja di kawasan Jalan Hayam Wuruk.

Informan keempat adalah Machmud Masykur sebagai tokoh dari masyarakat etnis Jawa. Beliau merupakan salah satu anggota pengurus PPP serta penjaga Masjid Jami' Pekalongan. Saat terjadi konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995 pada Jum'at 24 November, beliau berada di Masjid Jami' Pekalongan.

Informan kelima yang menjadi narasumber adalah Eddy Dasoeki yaitu tokoh dari masyarakat etnis Tionghoa di Kota

Pekalongan. Beliau merupakan anggota dari lembaga Bakom (Badan Komunikasi) di Kota Pekalongan sebagai perwakilan untuk masyarakat etnis Tionghoa. Saat kerusuhan terjadi pada Jum'at 24 November 1995, tempat usaha Eddy Dasoeki menjadi sasaran pengerusakan. Informan selanjutnya adalah Suardawa dari kepolisian, yang ikut mengamankan situasi saat konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995 terjadi.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber sejarah yang digunakan peneliti sebagai penunjang penelitian. Sumber sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, artikel, laporan penelitian, makalah, serta skripsi yang berhubungan dengan kajian penelitian sehingga menunjang hasil penelitian.

Sumber lisan yang digunakan peneliti sebagai sumber sekunder adalah informasi yang didapatkan peneliti dari narasumber yang tidak terlibat langsung, atau bukan saksi mata dari konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995. Informan tersebut adalah Dirhamsyah, seorang sejarawan Kota Pekalongan. Beliau bekerja sebagai jurnalis di Radio Batik Kota Pekalongan, dan sering terlibat dalam diskusi tentang keadaan masyarakat Kota Pekalongan ataupun peristiwa yang terjadi di Kota Pekalongan.

b. Teknik Pengambilan Data

1. Studi Pustaka

Merupakan proses mencari sumber, menelaah dan menghimpun data sejarah berupa buku-buku yang berkaitan dengan kajian penelitian. Buku-buku tersebut beberapa merupakan milik pribadi peneliti dan beberapa diperoleh dari Perpustakaan Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

2. Observasi

Observasi dilakukan sebagai suatu pengamatan langsung pada objek penelitian terlebih dahulu dalam melakukan penelitian . Peneliti melakukan penelitian dan pengamatan terhadap kajian penelitian yaitu Konflik Cina-jawa di Kota Pekalongan tahun 1995 dengan meninjau langsung tempat terjadinya konflik atau kerusuhan di Jalan Hayam Wuruk.

Hasil dari observasi yang dilakukan berupa dokumentasi suasana Jalan Hayam Wuruk, serta dokumentasi bangunan yang dulunya Toko Sinar Matahari yang merupakan rumah pelaku penyobekan, namun sekarang telah berubah menjadi

Toko Batik Huza.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dengan narasumber yang terkait dengan kerusuhan Cina-Jawa di Kota Pekalongan pada tahun 1995. Narasumber

yang berhasil diwawancarai oleh peneliti adalah satu saksi utama kasus penyobekan pada Rabu 22 November 1995, dua orang saksi konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995, satu sejarawan Kota Pekalongan, satu tokoh masyarakat etnis Jawa Islam di Pekalongan, satu tokoh masyarakat etnis Tionghoa di Pekalongan dan satu petugas kepolisian yang ikut berjaga pada saat konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995 terjadi.

4. Dokumen

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan dokumen seperti Majalah Gatra serta Surat Kabar Suara Merdeka yang diterbitkan sejaman dengan terjadinya konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995. Selain itu, peneliti juga memperoleh dokumen-dokumen dari Arsip Daerah Kota Pekalongan.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber dapat dilakukan setelah proses pengumpulan sumber dilakukan. Proses ini sangat penting mengingat sumber – sumber yang telah ditemukan harus dicari mana yang benar – benar fakta dan mana yang bukan. Kritik merupakan produk proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan agar terhindar dari fantasi, manipulasi atau fabrikasi, sumber-sumber pertama harus dikritik, sumber harus diverifikasi atau diuji kebenarannya dan diuji

akurasi atau ketepatannya, dengan demikian sumber sejarah dapat digunakan dengan aman (Suhartono, 2010: 36).

Kritik sumber sendiri terdiri atas dua kritik yaitu kritik internal dan kritik eksternal.

a. Kritik Eksternal

Kritik eksternal adalah usaha mendapatkan otentitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. Kritik eksternal mengarah pada pengujian terhadap aspek-luar dari sumber. Otentitas mengacu pada materi sumber yang sezaman. Sumber primer yang digunakan dari penelitian ini adalah sumber dokumen dari Arsip Daerah Kota Pekalongan, Majalah Gatra dan Surat Kabar Suara Merdeka. Kemudian sumber lisan yang diperoleh melalui wawancara dengan saksi mata konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995. Sumber sekunder berupa buku, artikel, laporan penelitian, makalah, skripsi, dan wawancara dengan narasumber yang mengetahui namun bukan saksi mata konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995.

Kritik eksternal yang telah dilakukan peneliti terhadap sumber dokumen adalah dengan melakukan uji fisik dokumen meliputi jenis tinta dan bahan kertas yang digunakan. Hasil yang diperoleh adalah sumber dokumen tersebut dapat dipercaya karena penulisan dokumen menggunakan mesin

ketik, dimana pada tahun 1995 mesin ketik banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jenis kertas dokumen adalah HVS yang pada tahun 1995 banyak digunakan oleh masyarakat. Dokumen dikeluarkan pada tahun yang sama atau sejaman yaitu tahun 1995, serta dikeluarkan oleh lembaga terpercaya yaitu lembaga pemerintahan. Dari hasil uji fisik tersebut, peneliti mempercayai dokumen yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber penelitian.

Kritik eksternal yang dilakukan peneliti terhadap sumber lisan yang telah didapat adalah dengan meneliti apakah narasumber benar-benar merupakan saksi mata konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995 dengan mengetahui alamat, umur, dan apa yang dilakukan narasumber saat konflik tersebut terjadi. Hasil yang didapat adalah informan atau narasumber yang diwawancarai peneliti merupakan saksi mata yang pada saat konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995 terjadi, berumur dewasa, tidak sakit ingatan, sehingga masih mengingat dengan baik peristiwa tersebut, dan berstatus sebagai warga Kota Pekalongan dan bertempat tinggal di Kota Pekalongan. Hal tersebut meyakinkan peneliti untuk menggunakan keterangan narasumber sebagai sumber penelitian.

Kritik eksternal yang dilakukan peneliti terhadap sumber sekunder berupa buku-buku, artikel, laporan penelitian, makalah, dan skripsi adalah mengetahui bahwa sumber-sumber tersebut dilakukan sesuai dengan kaidah penelitian yang benar dan berhubungan dengan kajian penelitian dalam skripsi ini.

b. Kritik internal

Kritik internal adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber, artinya apakah isi dokumen ini terpercaya, tidak dimanipulasi, mengandung bias, dikecohkan, dan lain-lain. Kritik internal dilakukan untuk memahami isi teks (Suhartono, 2010: 37). Kritik internal yang telah dilakukan peneliti pada sumber dokumen adalah menganalisis isi dokumen, dan bahasa yang digunakan dalam dokumen, serta mengkroscek dokumen dengan sumber-sumber lain yang sejamin. Hasilnya isi dokumen berhubungan dengan kajian penelitian, bahasa yang digunakan dalam dokumen merupakan bahasa yang telah disempurnakan (menggunakan EYD), dan setelah dikroscek dengan sumber-sumber primer lainnya memiliki benang merah pembahasan. Dari hasil tersebut, peneliti percaya kredibilitas sumber untuk digunakan dalam penelitian.

Kritik internal yang peneliti lakukan terhadap sumber lisan adalah dengan menelaah informasi yang diberikan

narasumber kepada peneliti, kemudian membandingkannya dengan narasumber lainnya serta membandingkan informasi yang telah didapat dengan dokumen-dokumen yang ada. Hasilnya informasi yang diberikan narasumber memiliki benang merah dengan narasumber lainnya, serta memiliki benang merah dengan dokumen-dokumen yang ada, sehingga peneliti yakin dengan informasi yang diberikan narasumber terhadap peneliti untuk digunakan sebagai sumber penelitian.

Kritik internal yang dilakukan peneliti terhadap sumber sekunder adalah dengan menelaah isi buku, artikel, laporan penelitian, makalah, serta skripsi, dan membandingkan dengan sumber-sumber lain yang sejaman, kemudian menarik kesimpulan isi atau pembahasan dari sumber-sumber tersebut. Hasilnya isi atau pembahasan dari sumber-sumber tersebut memiliki keterkaitan dengan sumber-sumber lainnya yang sejaman, sehingga peneliti yakin menggunakan sumber-sumber tersebut sebagai sumber sekunder untuk mendukung penelitian Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995.

3. Interpretasi

Setelah melalui dua tahap di atas, maka tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah. Setelah melakukan kritik sumber, peneliti mengelompokkan sumber-sumber sejarah berdasarkan isi atau

pembahasannya, agar mudah dalam penafsiran nantinya. Interpretasi sangat penting untuk dilakukan agar peneliti terhindar dari subjektivitas.

Dalam penelitian sejarah dibutuhkan ilmu-ilmu bantu agar hasil penelitian sejarah lebih akurat. Kajian penelitian merupakan kerusuhan yang melibatkan warga etnis Jawa dan warga etnis Tionghoa di Kota Pekalongan tahun 1995. George Simmel, seorang ahli yang mempelajari proses interaksi sosial di tingkat mikro melihat bahwa masyarakat lebih daripada hanya sekedar suatu kumpulan individu serta pola perilakunya (Habib, 2004: 37). Menurutnya masyarakat menunjuk pada pola-pola interaksi timbal balik antar individu. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Simmel terhadap bahan sejarah konflik sosial mengembangkan sejumlah proposisi. Dalam rangkaian proposisinya, Simmel menegaskan konflik sebagai suatu variabel yang menampilkan derajat intensitas interaksi. Dalam perangkat proposisi tentang intensitas konflik, Simmel mengemukakan bahwa semakin tinggi derajat keterlibatan emosional pihak yang terlibat dalam suatu konflik, maka semakin kuat kecenderungan untuk mengarah pada kekerasan.

Menurut pendapat Simmel di atas, apabila diterapkan pada konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995, maka dapat disimpulkan bahwa etnisitas merupakan salah satu pembentuk solidaritas masing-masing kelompok. Pada akhirnya, solidaritas internal ini yang akan meningkatkan keterlibatan emosional para anggota kelompok yang

bertikai. Dalam hal ini, solidaritas yang dimaksud adalah solidaritas di dalam etnis Jawa Islam di Kota Pekalongan.

4. **Historiografi**

Setelah ketiga tahap diatas selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah historiografi atau penulisan sejarah, yaitu menyusun hasil penelitian konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995 secara sistematis, agar mudah dipahami oleh pembaca.



BAB II

LATAR BELAKANG DAN KRONOLOGI KONFLIK CINA-JAWA DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 1995

Kemajemukan budaya yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang sangat bernilai, namun pada sisi lain kemajemukan tersebut memiliki potensi konflik di negara ini. Kemajemukan sering memicu munculnya konflik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), meskipun sebenarnya faktor-faktor penyebab dari konflik tersebut lebih sering disebabkan adanya ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan politik. Secara konseptual, potensi konflik yang besar dalam masyarakat Indonesia yang plural secara demografis maupun sosiologis disebabkan oleh terbelahnya masyarakat ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan identitas kultural (Rahardjo, 2005: 780). Pendapat lain diungkapkan oleh Parsudi Suparlan (2003) yang mengatakan, dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, keanekaragaman suku bangsa telah menghasilkan potensi konflik antar suku bangsa dan antar pemerintah dengan suatu masyarakat suku bangsa.

Turnomo Rahardjo (2005: 783) meringkas beberapa contoh konflik SARA yang melibatkan etnis Tionghoa, diantaranya adalah kerusuhan yang terjadi di Rengas Denglok, Jawa Barat pada tanggal 30 Januari 1997 dipicu seorang warga etnis Tionghoa merasa terganggu oleh ulah para pemuda yang membangunkan umat Islam untuk melaksanakan sahur, kemudian kerusuhan yang terjadi pada

tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta dan kota-kota lainnya, kerusuhan ini dipicu krisis politik menjelang tumbanganya rezim Orde Baru yang berimbas pada munculnya tindakan kekerasan terhadap warga Etnis Tionghoa. Konflik di Kebumen Jawa Tengah 7 September 1998 dipicu kemarahan majikan yang merupakan warga etnis Tionghoa terhadap anak buahnya seorang etnis Jawa yang menumpahkan oli, kejadian tersebut kemudian dimanipulasikan sebagai penganiayaan terhadap seorang pribumi. Pada tanggal 15 September 1998 di Bagan Siapi-api Sumatera Utara, kerusuhan dipicu oleh isu seorang warga etnis Jawa yang meninggal di rumah sakit akibat penganiayaan pemuda etnis Tionghoa.

Konflik yang melibatkan etnis Tionghoa, juga terjadi di Kota Pekalongan pada tahun 1995. Konflik yang terjadi menjelang berakhirnya Orde Baru ini merupakan konflik terbuka antara etnis Tionghoa dan etnis Jawa. Peristiwa kerusuhan tersebut berupa pengerusakan dan pembakaran bangunan ataupun benda milik etnis Tionghoa. Peristiwa itu merupakan gejala disintegrasi sosial, bahkan ada yang menyebutnya sebagai gejala malintegrasi sosial (Nurhadiantomo, 2004: 2). Malintegrasi merupakan aksi-aksi kolektif untuk menyatakan ketidaksukaan secara terbuka, secara teknis, malintegrasi terdiri dari aksi kerusuhan, penjarahan, perusakan, dan tawuran.

A. Latar Belakang Politik Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 1995

Keterlibatan orang Tionghoa dalam politik Indonesia bermula pada sebelum Perang Dunia II, elite peranakan Tionghoa terpecah dalam orientasi mereka, ada yang berkiblat ke Cina (*Grup Sin Po*),

ada yang berorientasi ke Belanda (Chu Hua Hui) dan ada juga yang berkiblat ke Indonesia (Partai Tionghoa Indonesia) (Suryadinata, 2002: 81). Namun setelah ditandatanganinya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, beberapa tokoh yang sebelumnya berorientasi ke Belanda meleburkan diri pada Persatuan Tionghoa yang didirikan pada 23 Mei 1948 di daerah-daerah yang diduduki Belanda (Suryadinata, 2002: 38).

Setelah RIS lahir pada 12 Maret 1950, Persatuan Tionghoa mengubah namanya menjadi Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI) tanpa mengubah asasnya, yaitu mempertahankan kepentingan kaum minoritas Tionghoa (Suryadinata, 2002: 44). Pada tahun 1954, PDTI dan organisasi peranakan lainnya melebur diri menjadi organisasi sosial politik yang berorientasi Indonesia, yaitu Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Setelah tahun 1954 golongan yang berorientasi Indonesia menjadi dominan. Sekelompok kaum peranakan dari generasi muda merasa tidak puas dengan kecenderungan kekiri-kirian dari Baperki, serta pada politiknya yang memisahkan diri dari masyarakat-pribumi Indonesia. Mereka bersatu di bawah bendera Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB). Kelompok itu menyerukan asimilasi total dari kaum minoritas Tionghoa ke dalam penduduk asli serta merupakan puncak usaha gerakan Tionghoa lokal yang berorientasi ke Indonesia (Suryadinata, 2002: 27).

Pada masa Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), Baperki berkembang menjadi organisasi massa, ia menitikberatkan integrasi (integrasi politik) bukan asimilasi, di kalangan orang Tionghoa. Organisasi itu makin condong ke kiri dan mendekati Soekarno untuk mendapat perlindungan. Politik kiri inilah yang akhirnya membawa Baperki musnah setelah terjadinya G-30-S pada tahun 1965. Dilarangnya Baperki dan perkumpulan-perkumpulan Tionghoa lainnya, menyebabkan para pengusaha etnis Tionghoa mulai menyokong Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) yang ditugaskan untuk menangani masalah Tionghoa. Badan yang disokong oleh pemerintah ini menganjurkan etnis Tionghoa di Indonesia berasimilasi total ke dalam masyarakat pribumi sebagai satu-satunya solusi masalah Tionghoa. Akan tetapi kemudian LPKB dibubarkan dan di atas puingnya dibentuk Bakom atau Badan Komunikasi pada tahun 1977 di bawah naungan Departemen Dalam Negeri, Bakom berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat Tionghoa (Suryadinata, 2002: 81-82).

Etnis Tionghoa yang tertarik untuk bergabung dalam kegiatan politik hanya dapat bergabung dengan partai-partai politik Indonesia yang ada (Golkar, PPP, dan PDI). Meskipun terdapat beberapa organisasi bersifat perantara seperti *Centre of Strategic and International Studies* (CSIS) dan Badan Komunikasi (BAKOM) yang beberapa diantara anggotanya berasal dari etnik Tionghoa,

namun organisasi-organisasi tersebut bukan organisasi Tionghoa dalam arti sesungguhnya (Suryadinata, 2003: 2).

Menurut Eddy (wawancara dilakukan pada Senin, 29 Februari 2016, lihat lampiran nomor 7), seorang tokoh Tionghoa di Kota Pekalongan yang sempat menjadi anggota Bakom di Pekalongan, mengatakan di dalam Bakom tersebut tidak hanya terdiri dari orang etnis Tionghoa saja, namun juga etnis Jawa dan Arab. Tujuan lembaga ini adalah apabila terjadi permasalahan di masyarakat para tokoh yang ada di Bakom dapat menengahi permasalahan tersebut agar tidak terjadi perselisihan berkepanjangan. Namun pada saat terjadi perselisihan antara warga etnis Jawa dan etnis Tionghoa karena warga Tionghoa yang tidak sengaja menyerempet warga etnis Jawa, tokohnya kurang berperan, karena menurut mereka apabila terjadi perselisihan yang menyangkut agama para tokoh ini akan mengambil tindakan.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Eddy (wawancara dilakukan pada Senin, 29 Februari 2016, lihat lampiran nomor 7), bahwa kondisi tersebut tidak lepas dari pengaruh pemusatan kekuatan politik pada Orde Baru, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Dengan adanya tiga kekuatan politik yang memiliki landasan pemikiran berbeda itu, kekuatan politik Islam terpusat pada PPP. Sehingga masyarakat Pekalongan yang mayoritas beragama Islam banyak sekali yang menjadi pendukung PPP.

Menurut Machmud (wawancara dilakukan pada Sabtu, 26 Februari 2016, lihat lampiran nomor 6), seorang tokoh masyarakat etnis Jawa Islam mengatakan, pada saat itu masyarakat pendukung PPP di Kota Pekalongan sangat fanatik. Bahkan sikap fanatik itu masuk ke dalam kehidupan sehari-hari mereka, contohnya, apabila ada selamatan dan ada *beseq* (tempat nasi yang terbuat dari anyaman bambu) mereka selalu menggunakan kertas warna hijau untuk melapisi *beseq* tersebut, karena warna hijau adalah warna dari lambang partai PPP. Tidak hanya itu, untuk pembelian bahan bakar meskipun mereka akan membeli tiga liter, mereka akan mengatakan satu liter hingga tiga kali, karena PPP berada di urutan nomor satu. Dari penuturan Machmud dapat disimpulkan fanatisme masyarakat Pekalongan terhadap Islam sangat tinggi pada tahun 1995, hal ini diperjelas oleh Eddy (wawancara dilakukan pada Senin, 29 Februari 2016, lihat lampiran nomor 7), yang berkata bahwa akibat dari pembagian kekuatan politik menjadi tiga berdampak pada rasa fanatisme masyarakat Pekalongan pada Islam sangat tinggi, sehingga wawasan mereka kurang nasional.

Dari penjelasan di atas, kondisi masyarakat Pekalongan yang sangat fanatik terhadap suatu hal (dibaca: muslim) sebagai mayoritas, secara tidak langsung mereka merasa bahwa mereka sangat kuat dan berani mengambil suatu tindakan, dalam hal ini ketika mereka marah karena aksi seorang etnis Tionghoa merobek Kitab Suci Al Qur'an,

meskipun aparat kepolisian dan tokoh masyarakat sudah menghimbau agar tidak tersulut amarah, mereka tetap melakukan kerusuhan. Hal ini terlihat karena puncak kerusuhan terjadi pada hari Jum'at, dimana hari Jum'at banyak masyarakat muslim Pekalongan yang libur, dan ratusan massa melakukan pelemparan batu pada toko-toko dan rumah-rumah masyarakat Tionghoa setelah shalat Jum'at selesai dilaksanakan.

B. Latar Belakang Ekonomi Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 1995

Akar permasalahan yang menyulut kerusuhan etnis di berbagai kota Indonesia menjelang era Reformasi tidak jauh berbeda, yaitu adanya kesenjangan sosial ekonomi yang kronis dan akumulatif yang dikemas oleh faktor-faktor etnis dan agama. Pada masa Pemerintahan Hindia-Belanda, orang-orang Cina, selain memiliki status sebagai “golongan tengah” di antara golongan Eropa dan penduduk pribumi, juga dimanfaatkan oleh Belanda sebagai penarik berbagai jenis pajak dan lebih dari itu adalah sebagai “golongan perantara” dalam perdagangan distribusi maupun koleksi (Nurhadiantomo, 2004: 113). Perdagangan besar mendapatkan lapangan kerja dalam perdagangan luar negeri Hindu-Belanda. Perdagangan perantara meliputi perdagangan grosir dan perdagangan kecil (termasuk pedagang keliling) yang mengarah pada bidang distribusi dan koleksi. Koleksi atau pengumpulan ada perdagangan

pengumpulan dan pembelian borongan. Perdagangan perantara merupakan penghubung antara pusat-pusat perdagangan dengan daerah pedalaman. Dengan kata lain, pedagang-pedagang perantara menjadi jembatan yang menghubungkan antara perusahaan-perusahaan impor dan ekspor bangsa Eropa di satu pihak dengan konsumen dan produsen (produsen kecil) pribumi di lain pihak, menuju timbal-balik. Kedudukan ekonomi orang Tionghoa pada masa ini adalah warisan sejarah kolonial, karena politik Belanda, orang Tionghoa menjadi orang tengah (*middlemen*) antara Belanda dan pribumi. Di Pulau Jawa, mereka dibatasi pada perdagangan dan orang Tionghoa berangsur-angsur mendominasi sektor perdagangan (Suryadinata, 2002: 60). Dominasi dalam berbagai lapangan ekonomi seperti sektor industri, perdagangan, dan keuangan (perbankan) oleh etnis Tionghoa merupakan faktor utama yang mempengaruhi kesenjangan sosial di dalam kehidupan masyarakat etnis Tionghoa dan etnis Jawa.

Kekuatan ekonomi Tionghoa pada masa Orde Baru semakin kuat, disebabkan oleh kebijakan-kebijakan Soeharto yang mementingkan pertumbuhan ekonomi dan mengarahkan orang Tionghoa ke bidang ekonomi. Pemerintah Soeharto menutup bidang-bidang lain untuk orang Tionghoa. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, muncul beberapa ratus konglomerat, di antaranya yang terbanyak adalah dari kelompok etnis Tionghoa, dan yang paling

banyak membayar pajak penghasilan di antara konglomerat itu juga etnis Tionghoa. Ini sering dijadikan bukti bahwa etnis Tionghoa mendominasi ekonomi di Indonesia, seakan-akan semua konglomerat itu adalah Tionghoa dan kekayaan mereka yang berlimpah-limpah itu adalah hasil KKN (Suryadinata, 2002: 59). Banyaknya konglomerat yang berasal dari etnis Tionghoa itu memunculkan sebuah istilah yaitu *Cukong*. *Cukong* adalah istilah Tionghoa dalam dialek Hokkian yang berarti majikan. Namun, di Indonesia, istilah itu digunakan untuk mengacu kepada seorang pengusaha etnis Tionghoa yang bekerjasama dengan anggota elite penguasa Indonesia, biasanya tentara atau pejabat tinggi. Sang *Cukong* menyediakan keterampilan menjalankan usaha dan kadang-kadang modal, sedangkan elite penguasa Indonesia memberikan perlindungan dan berbagai fasilitas kepadanya (Suryadinata, 2002: 129).

Dari berbagai etnis yang ada di Pekalongan yang paling menonjol menguasai perdagangan adalah etnis Tionghoa, mereka cukup ulet di dalam melakukan pekerjaannya. Bahkan sampai sekarang selain berusaha di bidang tekstil, mereka juga bergerak di bidang *real estat* (Nurdiyanto, 2004: 12). Menurut penuturan Dirhamsyah (wawancara dilakukan pada Sabtu, 27 Februari 2016, lihat lampiran nomor 8), pada tahun 1880 perkembangan batik menjadi amat kuat setelah ditemukannya metode penanaman serat

kapas dari tanaman yang sangat ahli dilakukan oleh orang-orang Tionghoa di Pekajangan. Ditemukannya serat ini membuat jiwa dagang orang Pekalongan tumbuh.

Munculnya pengusaha baru pribumi dan pengusaha kelompok menengah menyebabkan industri batik di Pekalongan menunjukkan perkembangan yang sangat pesat pada pertengahan abad 19, karena kelompok pengusaha baru ini mendapatkan pasarnya di kalangan masyarakat etnis Jawa. Sistem yang digunakan adalah mengikuti pola lama yang sebelumnya dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad 16-17 Masehi. Pada masa yang sama didirikan Serikat dagang Islam yang dipelopori pengusaha batik dari Solo, yaitu H. Samanhudi (wawancara Dirhamsyah, dilakukan pada Sabtu, 27 Februari 2016, lihat lampiran nomor 8).

Pada tahun 1936, pengusaha batik dari Wonopringgo, Pekajangan, Buaran, dan Setono, mendirikan sebuah organisasi bernama Batik Bond yang dipelopori oleh H. Ali Djeri, H. Zarkasi, H. Akil dan H. Madnoer Wiryo yang merupakan cikal bakal koperasi batik. Tujuan organisasi ini adalah membeli bahan baku batik langsung dari importer Belanda; memasarkan produksi batik secara bersama-sama; melepaskan para pengusaha batik dari jeratan sistem kredit dari orang Tionghoa dan Arab, karena pada saat itu di Pekalongan etnis Tionghoa yang merupakan penyedia bahan baku batik, menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, kemudian

menimbulkan kemarahan etnis Jawa saat etnis Tionghoa ikut menjual batik printing dengan harga yang lebih murah, namun tidak sampai menimbulkan kerusuhan atau hanya bersifat laten.

Kondisi ekonomi masyarakat Kota Pekalongan pada tahun 1995 dan tahun-tahun sebelumnya mengalami pasang surut. Masyarakat Kota Pekalongan sebagian besar bekerja dibidang industri tekstil yaitu batik. Batik di Pekalongan mengalami puncak kesuksesan pada tahun 1950-an, yaitu pada saat pemerintah melakukan kebijakan menumbuhkan kewirausahaan Indonesia dan menumbuhkan nasionalisme ekonomi. Di Kota Pekalongan sudah ada GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia), yang sebagian besar anggotanya masyarakat wilayah karesidenan Pekalongan. Kemudian Koperasi Batik Setono yang ada di paling ujung timur Kota Pekalongan (Sekarang Kabupaten Batang), Koperasi Batik Wanapringga, Batik Pencongan dan lain sebagainya. Koperasi-koperasi ini memang dimaksudkan untuk mengangkat perekonomian etnis Jawa dengan memberikan fasilitas-fasilitas tertentu serta hak-hak istimewa dalam penyediaan bahan baku, obat-obatan batik, dan lain sebagainya yang pada masa pemerintahan Soekarno sering disebut dengan “Berdikari”.

Berdirinya koperasi-koperasi tersebut menandai bangkitnya pengusaha etnis Jawa Islam yang selama ini berada dalam posisi lemah. Timbulnya rasa persatuan diantara pengusaha batik melalui

koperasi telah memperkuat posisi industri batik sebagai pilar pembangunan ekonomi. Sejak tahun 1950-an hingga pertengahan tahun 1970-an merupakan puncak kejayaan koperasi di Pekalongan. Berbagai pabrik mori berdiri seperti Setono, Pringlangu, Buaran, Kedungwuni, dan Pekajangan. Bahkan pada saat itu, Pekalongan menjadi pusat penghasil mori dan pemasok mori di Jawa.

Pada tanggal 10 Januari 1967 pemerintah memberlakukan Undang-Undang No 1 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan 3 Juli 1968 Undang-Undang no 6 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Akibatnya pada tahun 1970-an muncul investor-investor besar yang menanamkan modalnya dalam usaha batik printing seperti batik Danar Hadi, Batik Keris, Batik Semar dan lain-lain di Surakarta. Ketika itu di Pekalongan juga berdiri industri tekstil printing yang berlatar belakang modal asing maupun modal dalam negeri. Kehadiran pabrik tekstil itu menyebabkan kehancuran pengusaha batik skala kecil, tetapi pengusaha besar tidak banyak terpengaruh. Industri printing tersebut berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi masyarakat Pekalongan yang sebagian besar bermata pencaharian dalam industri kerajinan batik (Hayati: *Laporan Penelitian Jurusan Sejarah FIB UNDIP*).

Pada tahun 1978 banyak pengusaha yang memproduksi batik printing dan mulai meninggalkan batik tulis. Pada waktu itu, persaingan antara batik tulis dan batik printing semakin tajam dan

efek yang dirasakan semakin besar pada tahun 1980-an. Produksi batik printing yang berskala besar, menyebabkan pengusaha batik tulis tidak mampu memproduksi banyak dan memasarkannya. Akibatnya produksi menumpuk dan perputaran modal terhenti. Jaringan pemasaran batik ternyata tidak mampu mereka tembus karena dikuasai oleh para pedagang non-pribumi, terutama etnis Tionghoa. Akhirnya, banyak pengusaha batik menjadi buruh para pengusaha atau pedagang etnis Tionghoa.

Adanya pergeseran status seperti diterangkan di atas timbul kesenjangan yang dialami oleh masyarakat etnis Jawa yang menjadi buruh dan masyarakat etnis Tionghoa yang menjadi majikan. Kesenjangan tersebut lebih dirasakan oleh masyarakat etnis Jawa di kalangan menengah ke bawah yang biasanya bekerja sebagai buruh pada etnis Tionghoa. Hal ini merupakan salah satu yang melatarbelakangi konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995. Terbukti dengan para pelaku yang melakukan kerusuhan merupakan kalangan menengah ke bawah (wawancara Dirhamsyah pada Sabtu, 27 Februari 2016, lihat lampiran nomor 8).

Kecemburuan sosial akibat kesenjangan ekonomi antara masyarakat etnis Tionghoa dan masyarakat etnis Jawa ini, dapat dilihat dengan dirusaknya toko-toko atau tempat usaha milik warga etnis Tionghoa pada saat kerusuhan di Pekalongan tahun 1995.

C. Latar Belakang Sosial Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 1995

Konflik sosial yang sering terjadi dan melibatkan warga etnis Tionghoa sebagai sasaran amarah massa menjadi pertanda bahwa interaksi antar kelompok didalam masyarakat Indonesia belum berjalan dengan baik. Sebenarnya, orang-orang Cina di Indonesia menikmati masa-masa yang relatif tenang sampai tahun 1960, namun pada saat terjadi G 30S/PKI, orang-orang Cina dituduh terlibat di dalam aksi tersebut karena keterlibatan Baperki dalam PKI. Pada masa Orde baru, pemerintah memberlakukan berbagai aturan sebagai cara untuk mengontrol etnis Tionghoa di Indonesia.

Peraturan-peraturan tersebut dapat dilihat sebagai diskriminasi hukum terhadap mereka karena dianggap asing dan diragukan kesetiaan mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Secara sosial, tindakan-tindakan diskriminatif dalam bidang hukum diikuti oleh anggota-anggota masyarakat pribumi yang berkepentingan untuk menguasai atau mengambil alih kekuasaan etnis Tionghoa dalam bidang bisnis dan perdagangan. Dampak dari tindakan-tindakan diskriminatif tersebut adalah pemalakan, pemerasan, pembakaran dan penghancuran rumah dan pertokoan, etnis Tionghoa tidak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan sewajarnya. Sebagai golongan minoritas, mereka menjadi kambing hitam atas

berbagai kekacauan ekonomi baik nasional maupun lokal (Suparlan 2003: 30).

Akibat G 30S, warga Tionghoa dipaksa meninggalkan ciri kecinaannya untuk membuktikan kesetiaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Banyak warga etnis Tionghoa yang akhirnya mengganti nama mereka dengan nama Indonesia, selain itu, beberapa diantaranya masuk Islam, karena menganggap bahwa masuk Islam adalah salah satu cara agar mereka dapat berbaur dengan masyarakat pribumi. Hal ini diperjelas pada tahun 80-an salah seorang tokoh LPKB, Junus Jahya , mulai menganjurkan orang Tionghoa masuk Islam sebagai identitas mereka di Indonesia.

Pada zaman LPKB, meskipun tokoh-tokohnya menganjurkan orang Tionghoa berasimilasi ke masyarakat Indonesia asli, tetapi tidak secara terang-terangan menyerukan orang Tionghoa mengganti agama menjadi Islam, Junus Jahya-lah yang mencetuskan ide tersebut ini (masuk Islam) secara tegas. Ia pindah agama menjadi seorang muslim dan aktif berdakwah. Ditanyai identitasnya, Junus Jahya menjawab bahwa ia seorang muslim, Indonesia dan Keturunan Cina. Ia menekankan kemuslimannya daripada identitas kebangsaan dan etnisnya. Ia tidak melihat adanya konflik antara agamanya dan identitas nasional maupun etnisnya. Ia yakin bahwa Islam merupakan faktor pemersatu di Indonesia (Suryadinata, 2002: 53).

Pemikiran Junus mungkin benar, karena menurut penuturan Abdul Muntholib (2008: 109), persaingan ekonomi antar etnis yang melibatkan etnis Tionghoa dengan pribumi merupakan sebab dari semangat anti Tionghoa di Indonesia, sedangkan yang menentang secara kuat dominasi ekonomi masyarakat etnis Tionghoa atas pribumi adalah kaum santri, karena itu Islam menjadi ideologi yang memungkinkan kaum pedagang kecil masyarakat pribumi melawan pedagang Tionghoa. Dapat dikatakan bahwa Tionghoa Indonesia merupakan tawanan dari situasi dan sejarah mereka sendiri. Sebagai etnis minoritas dengan kondisi ekonomi yang baik atau relatif kaya dengan melakukan perdagangan yang tidak seimbang menyebabkan rasa antipati dari para pesaing pengusaha pribumi.

Pergantian nama, perubahan pemakaian bahasa, perubahan adat-istiadat, merupakan perubahan dalam dunia simbolik orang-orang Tionghoa, lebih banyak karena intervensi pemerintah atau secara teknis disebut sebagai “asimilasi rekayasa” melalui berbagai peraturan (Nurhadiantomo, 2004: 143). Terjadinya pergantian agama, merupakan perubahan dunia simbolik yang bersifat spesifik, karena menyangkut keyakinan seseorang. Penguasa memang tidak secara terang-terangan menggiring etnis Tionghoa untuk menganut agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah. Tetapi secara implisit, pemerintah yang hanya mengakui beberapa agama resmi,

proses penggiringan itu tetap terjadi. Oleh karena itu, pergantian agama ini juga tidak lepas dari intervensi pemerintah.

Perubahan-perubahan tersebut merupakan kecenderungan yang terjadi di tanah air, termasuk di Kota Pekalongan. Buktinya pada tanggal 16 Juni tahun 1983, Kantor Pembantu Gubernur Jawa Tengah Untuk Wilayah Pekalongan mengirimkan surat kepada semua Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Wilayah Kerja Pembantu Gubernur Jawa Tengah Untuk Pekalongan perihal pencegahan masyarakat penganut Agama Budha pribumi untuk tidak berorientasi kebudayaan Cina. Surat tersebut berlampirkan fotocopy surat Telegram Don Rom 071/Wijayakusumo tanggal 6 Juni 1983 (Surat Kantor Pembantu Gubernur Jawa Tengah Untuk Wilayah Pekalongan Nomor 420/33, koleksi Kantor Arsip Daerah Kota Pekalongan).

Anjuran menggunakan nama Indonesia bagi etnis Tionghoa pertama kali termuat pada peraturan pemerintah RI No. 20/1959 tentang pelaksanaan perjanjian dwi kewarganegaraan RI-RRT pasal 3 ayat 2 (Retno, 2013: 38). Pada saat Orde Baru berkuasa, pemerintah Orde Baru mempercepat asimilasi warga negara keturunan asing dengan lebih menggalakkan lagi pergantian nama orang-orang etnis Tionghoa dengan nama yang sesuai dengan nama Indonesia dengan mengeluarkan prosedur yang lebih sederhana melalui Keputusan Presidium Kabinet No. 127/Kep/12/1966.

Keputusan presidium dikeluarkan untuk mempermudah proses ganti nama dibanding dengan Undang-Undang sebelumnya.

Melalui prosedur baru, proses ganti nama tidak perlu dilakukan di pengadilan dan diumumkan dalam Berita Negara, tetapi cukup dilakukan di kantor kabupaten atau kantor walikota dengan biaya tidak lebih dari Rp. 25,-, namun peraturan ini hanya berlaku sampai 1 Maret 1968. Di Kota Pekalongan etnis Tionghoa juga melakukan pergantian nama. Tercatat mulai tahun 1961 hingga 1990 sebanyak 1199 warga etnis Tionghoa Kota Pekalongan telah mengganti nama mereka menjadi nama Indonesia (Daftar Ganti Nama milik Kantor Sospol Kota Pekalongan, Koleksi Arsip Daerah Kota Pekalongan, bagian Kantor Sospol tahun 1961-1990).

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota pesisir yang ada di Jawa Tengah. Karakteristik mayoritas masyarakat Kota Pekalongan selain dikenal sebagai pemeluk agama Islam dengan tingkat religius yang tinggi, juga dikenal sebagai masyarakat yang mudah tersulut emosi, sehingga Kota Pekalongan masuk dalam kategori daerah “Sumbu Pendek”, atau daerah yang rawan terhadap isu-isu tentang agama. Mayoritas masyarakat etnis Tionghoa merupakan non muslim. Pada saat terjadi pergeseran status pengendali ekonomi yang telah dijelaskan dalam subbab kedua, hal tersebut menimbulkan dampak kecemburuan sosial yang dialami oleh etnis Jawa yang mayoritas beragama Islam.

Dapat digambarkan bahwa kondisi sosial masyarakat Kota Pekalongan pada tahun 1995 adalah warga etnis Tionghoa merupakan orang kaya dan nonmuslim, sedangkan warga etnis Jawa merupakan orang miskin dan beragama Islam. Keadaan tersebut tentu saja menjadikan ketegangan pada hubungan kedua etnis tersebut dan menjadi salah satu pemicu terjadinya kerusuhan di Kota Pekalongan pada tahun 1995, terlihat dari rumah ibadah yang rusak oleh massa adalah gereja, vihara. Dijelaskan pula oleh Eddy (wawancara dilakukan pada Senin, 29 Februari 2016, lihat lampiran nomor 7), bahwa di Kota Pekalongan banyak warga keturunan Arab yang kaya, namun mereka tidak pernah terkena amuk massa, dan warga etnis Tionghoa yang beragama Islam dan tinggal di daerah rawan tidak terkena amuk massa pada saat kerusuhan.

Keadaan masyarakat Kota Pekalongan seperti yang telah dijelaskan di atas, melatarbelakangi konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995 yang terjadi pada hari Rabu 22 November 1995 hingga hari Jum'at 24 November 1995. Dipicu oleh kabar pelecehan agama yang dilakukan oleh seorang Cina, masyarakat etnis Jawa kota Pekalongan melampiaskan kemarahannya dengan merusak bangunan-bangunan milik etnis Tionghoa di Kota Pekalongan.

D. Pemicu Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995

Kerusuhan Cina-Jawa di Kota Pekalongan dipicu oleh seorang keturunan Tionghoa bernama Yoe Sing Yoeng berumur 42 tahun

yang merobek Kitab Suci Al Qur'an pada Rabu 22 November 1995 pukul 05.45 WIB di Jl. Hayam Wuruk Pekalongan (lihat lampiran nomor 9). Alwi dalam laporannya kepada petugas keamanan yang tercatat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada Rabu tanggal 22 November 1995 dan Esah pada Rabu tanggal 29 November 1995 (Berita Acara Pemeriksaan M.Alwi dan Esah, Koleksi Arsip Daerah Kota Pekalongan), pada saat kejadian pelaku berdiri di trotoar menghadap ke jalan (selatan) tangan kirinya memegang Al Qur'an dalam keadaan terbuka dan tangan kanannya merobek Al Qur'an, penyobekan dilakukan lebih dari sepuluh kali, dalam satu tarikan terdapat beberapa lembar yang dirobek yang kemudian di lempar hingga berhamburan di jalan. Saat melakukan penyobekan Yoe Sing Yoeng meneriakkan kalimat "ini lho Al Qur'an saya sobek" dengan mata melotot. Setelah merobek Al Qur'an, Yoe Sing Yoeng turun ke jalan (aspal) meletakkan Al Qur'an yang belum tersobek di jalan dengan posisi terbuka lalu mengeluarkan alat kemaluannya kemudian kencing.

Yoe Sing Yoen kemudian masuk kedalam toko Sinar Matahari dan menutup pintunya agak keras. Kejadian yang disaksikan beberapa orang tersebut mendapatkan perhatian warga. Beberapa dari mereka berhenti dan memperhatikan kejadian tersebut. Salah satunya adalah Alwi warga Kauman, saat kejadian Alwi sedang melakukan olah raga pagi, dan melihat seorang laki-laki keturunan

Tionghoa merobek-robek kertas (buku) (Berita Acara Pemeriksaan Alwi, Rabu 22 November 1995, koleksi Kantor Arsip Daerah Kota Pekalongan). Saat berjalan semakin mendekat Alwi mendapati bahwa sebuah buku yang dirobek adalah Kitab Suci Al Qur'an. Alwi kemudian mencari bantuan orang lain untuk menghubungi polisi namun tidak ada yang mau. Saat Alwi kembali kearah laki-laki keturunan Tionghoa ia mendapati orang tersebut sedang kencing kemudian melempar Al Qur'an ke jalan. Saat Yoe Sing Yoen masuk ke dalam toko Sinar Matahari, Alwi kemudian mengambil Al Qur'an tersebut dan bertemu dengan pengendara vespa untuk dimintai tolong menghubungi polisi.

Pada saat itu banyak orang berdatangan dan menanyakan kepada Alwi siapa yang merobek AL Qur'an itu, Alwi menjawab "ini lho Cina sini" sambil menunjuk toko Sinar matahari. Beberapa orang kemudian mencoba mendobrak pintu toko Sinar Matahari sampai pintunya jebol (berlubang), tak begitu lama Loe Tjo Yen, ibu Yoe Sing Yoeng keluar dan mengatakan bahwa anaknya gila.

Kemudian datang seorang petugas bernama pak Suhadi, setelah beberapa lama kemudian datang beberapa petugas menggunakan Mobil Kijang Dinas yang langsung mengamankan situasi dan mengamankan jalannya lalu lintas, Alwi Kemudian menunjukan Al Qur'an kepada petugas yang kemudian menanyakan siapa yang telah menyobek Al Qur'an tersebut. Setelah Alwi

menjawab bahwa yang merobek berada didalam Toko Sinar Matari, petugas itu masuk kedalam toko. Alwi dan beberapa orang mengumpulakn sobekan Al Qur'an dan membungkusnya menggunakan kertas koran lalu menyerahkannya kepada petugas didalam toko. Selang beberapa saat kemudian petugas yang masuk ke Toko Sinar Matahari keluar sambil membawa Yoe Sing Yoeng (pelaku perobekan Al Qur'an) dan massa berteriak untuk mengeroyok pelaku, namun dihalang-halangi petugas dan pelaku langsung dimasukan kedalam mobil dan dibawa bersama saksi menuju Polres Pekalongan (wawancara Alwi, dilakukan pada Sabtu 26 Februari 2016, lihat lampiran nomor 2).

Yoe Sing Yoeng merupakan anak ke 4 dari sembilan bersaudara dan mulai tinggal di Jl. Hayam Wuruk bersama kakak laki-lakinya Tomy Yuwono, ibu Loe Tjo Yen dan keponakannya Yenny Mulyokusumo sejak tahun 1953 (Berita Acara Pemeriksaan Tomy Yuwono, kakak pelaku penyobekan, Kamis 23 November 1995, koleksi Kantor Arsip Daerah Kota Pekalongan). Yoe Sing Yoeng merupakan penderita *schizophrenia paranoid*, gangguan jiwa kambuhan dengan dampak penurunan fungsi peran dirinya secara mencolok baik dalam pekerjaan maupun hubungan sosial (lihat lampiran nomor 10 dan 13). Hal tersebut juga dijelaskan oleh kakak pelaku, menurut penuturan kakak Yoe Sing Yoeng dalam kesaksiannya adiknya tersebut telah menderita gangguan jiwa sejak

umur kurang lebih 20 tahun (Berita Acara Pemeriksaan Tomy Yuwono, kakak pelaku penyobekan, pada Kamis 23 November 1995, koleksi Kantor Arsip Kota Pekalongan).

Yoe Sing Yeon pernah dirawat pada dokter Lutiarmo Pekalongan, setelah itu ia diperiksakan di Rumah Sakit Tentara Magelang antara tahun 1970 sampai 1980, Rumah Sakit Tawang tahu tahun 1980an keatas. Pada tahun 1991 masuk lagi ke rumah sakit Jiwa Magelang. Dalam Surat Keterangan Sakit Jiwa yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan R.I Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Rumah Sakit Jiwa Pusat Magelang pada 23 November 1995, ditulis pada 10 Januari 1991 sampai 16 Juli 1991, dan 1 Maret 1995 sampai 18 Juni 1995 Yoe Sing Yoeng pernah rawat inap di rumah sakit tersebut (lihat lampiran nomor 10). Selanjutnya Yoe Sing Yoeng berobat jalan pada dokter H. Achmad Hardiman. Yoe Sing Yoeng juga pernah dititipkan kakaknya di Polres Pekalongan sebanyak dua kali.

Al Qur'an yang di sobek dan dikencingi oleh Yoe Sing Yoeng merupakan miliknya yang biasa disimpan dikamarnya dan juga biasa dibawa keluar masuk kamar (BAP Tomy Yuwono (kakak pelaku penyobek Al Qur'an), Kamis 23 November 1995, koleksi Kantor Arsip Daerah Kota Pekalongan). Ia membeli Al Qur'an tersebut di Toko Raja Murah seharga Rp 3500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) sekitar bulan Oktober 1995, keterangan ini didapat dari Suciani yang

merupakan pelayan Toko Buku Raja Murah Pekalongan (Berita Acara Pemeriksaan Suciani, penjaga Toko Raja Murah, Rabu 22 November 1995, koleksi Kantor Arsip Daerah Kota Pekalongan). Suciani mengatakan pada bulan Oktober tahun 1995 sekitar jam 11.00 WIB seorang Tionghoa berjalan kaki sendirian datang ke toko. Sebelum membeli Yoe Sing Yoeng sempat membuka-buka lembaran Al Qur'an tersebut dan membukanya dari sebelah kiri, lalu menanyakan bagaimana cara membukanya. Saat membeli Yoe Sing Yoeng terlihat bingung dan bicaranya gugup.

Keluarga Yoe Sing Yoeng sebenarnya mengetahui bahwa Yoe Sing Yoeng memiliki Al Qur'an. Kakanya Tomi Yowono mengatakan bahwa ia pernah melihat adiknya membuka-buka buku yang bertuliskan huruf Arab, Tomi kemudian bertanya kepada Yoe Sing Yoeng dalam bahasa Jawa "Yoen koe delok buku opo?" (Yoeng kamu lihat buku apa?) Yoe Sing Yoeng menjawab buku tersebut tulisan Arab dan setiap kali ditanyai Yoe Sing Yoeng hanya terdiam. Tomi kemudian bertanya mendapatkan buku tersebut dari mana dan Yoe Sing Yoeng mengatakan bahwa buku tersebut ia beli dari Toko Raja Murah.

Selain kakaknya, ibu Yoe Sing Yoeng juga mengetahui bahwa anaknya memiliki Kitab Suci Al Qur'an. Mengetahui Yoe Sing Yoeng membawa Al Qur'an dan mempelajarinya, keluarga Yoe Sing Yoeng hanya mengingatkan dia kalau mau mempelajari Al Qur'an

harus belajar yang baik yang baik karena kalau dia salah membacanya akan menjadi perkara. Keluarga Yoe Sing Yoeng tidak berani melarang, karena kalau dilarang dia akan marah.

E. Kronologi Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995

Pada hari Rabu, tanggal 22 November 1995, sekitar pukul 05:00 WIB hingga 07:00 WIB kedapatan tengah melakukan penyobekan Al Qur'an di toko Sinar Matahari Jl. Hayam Wuruh No. 230 (Pekalongan yang sekarang menjadi toko Batik Huza). Setelah kejadian itu, semakin siang massa semakin banyak yang berkumpul menanyakan siapa yang melakukan perobekan, setelah mengetahui pelaku perobekan masuk kedalam toko Sinar Matahari, beberapa orang mencoba mendobrak pintu toko hingga mengalami kerusakan (berlubang) (wawancara dengan Alwi, dilakukan pada Sabtu, 26 Februari 2016. Lihat lampiran nomor 2).

Setelah itu polisi datang dan pelaku diamankan ke Polres Pekalongan. Malamnya sekitar pukul 21:00 WIB kerusuhan terjadi, massa melampiaskan kemarahannya dengan cara melempari rumah-rumah milik etnis Tionghoa. Pada peristiwa tersebut, vihara dan gereja juga menjadi sasaran amuk massa. Kerusuhan kembali terjadi keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 23 November 1995, sekitar pukul 10:00 WIB, massa kembali melakukan pengrusakan,

yang menjadi sasaran kali ini adalah Sekolah Masehi (Nurdiyanto, 2004: 51).

Kemarahan massa yang belum reda menimbulkan kerusuhan yang lebih besar pada hari Jum'at tanggal 24 November 1995 tepatnya setelah mengikuti shalat Jum'at, ratusan jamaah Masjid Jami' Pekalongan bergerak ke berbagai arah sambil membawa batu. Menurut penuturan beberapa narasumber ada proses pemakaman menuju Sapuro sambil melempari batu, kemudian salah satu narasumber menjelaskan bahwa isi keranda mayat tersebut merupakan batu yang digunakan untuk melempari rumah dan toko milik masyarakat Tionghoa (wawancara Machmud pada Sabtu, 26 Februari 2016, lihat lampiran nomor 6 dan wawancara Dirhamsyah, Sabtu, 27 Februari 2016, lihat lampiran nomor 8).

Beberapa lokasi yang dijadikan sasaran amuk massa adalah sepanjang Jalan Hayam Wuruk, Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Sudirman, Jalan Wahidin, Jalan KH Mansyur, Jalan Merdeka, dan Jalan Sultan Agung. Salah seorang narasumber mengatakan kejadian tersebut sangat cepat, toko-toko orang Tionghoa dilempari batu sehingga mereka cepat-cepat menutup toko mereka (wawancara dengan saksi kerusuhan, Sabari, dilakukan pada Jum'at, 25 Februari 2016, lihat lampiran nomor 4 dan Abu Hasan, dilakukan pada Jum'at, 25 Februari 2016, lihat lampiran nomor 3).

Kerusuhan tersebut mengakibatkan bangunan-bangunan mengalami kerusakan. Toko Buku Siswa yang letaknya diujung Jalan Hayam Wuruk merupakan salah satu toko yang mengalami kerusakan yang paling parah, dinding toko yang terbuat dari kaca dipecah. Tidak hanya rumah dan toko, pabrik tekstil Lokatek di Pekalongan Barat dan pabrik tekstil Kismatek juga dirusak oleh massa yang marah akibat penyobekan Al Qur'an itu.

Pada Senin sore, 27 November 1995, Yoe Sing Yoeng pelaku penyobek Al Qur'an dikabarkan meninggal disel tahanan Mapolres akibat sakit (lihat lampiran nomor 20). Jenazah Yoe Sing Yoeng kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Keraton Pekalongan untuk diotopsi. Dikabarkan bahwa pelaku meninggal karena suatu penyakit tertentu namun pihak keluarga tidak mau menjelaskan apa penyakit Yoe Sing Yong yang membuatnya meninggal (lihat lampiran nomor 14).

Menurut Danrem 071/Wijayakusuma, melalui Kepala Penerangan Korem, menjelaskan meninggalnya Yoe Sing Yoeng tidak perlu dicurigai. Kematian Yoe Sing Yoeng alias Ayoeng memang mendadak. Pada Senin, 27 November 1995, pukul 14:00 WIB, Ayoeng melakukan gerakan silat, namun pukul 16:20 WIB, Ayoeng sudah meninggal. Pada pukul 17:30, petugas Polres membawanya ke RSUD Keraton. Jenazahnya diperiksa oleh Dr. Made. Dari hasil pemeriksaan Ayoeng diperkirakan meninggal

sekitar pukul 14:45 WIB. Sedangkan untuk memastikan jenis penyakit apa yang menyebabkan pelaku penyobek Al Qur'an itu meninggal, dokter masih mengadakan pemeriksaan. Hingga Selasa malam jenazah Yoe Sing Yoeng masih berada di RSUD Keraton Pekalongan (lihat lampiran nomor 20). Setelah kabar kematian Yoe Sing Yoeng diketahui oleh masyarakat, kerusuhan tidak terulang kembali, dan kondisi masyarakat Pekalongan kembali normal seperti sebelum adanya kasus penyobekan Al Qur'an tersebut.



BAB V

PENUTUP

Setelah dilakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995 dilatar belakangi oleh faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial masyarakat Kota Pekalongan. Faktor politik masyarakat Kota Pekalongan pada tahun 1995 melatarbelakangi konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan, disebabkan oleh penyederhanaan partai politik kedalam tiga partai saja, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Masyarakat Kota Pekalongan yang mayoritas beragama Islam dengan tingkat religius yang tinggi merupakan pendukung PPP. Mereka memiliki rasa fanatik yang tinggi terhadap partai PPP, hal ini tercermin dari kehidupan masyarakat Kota Pekalongan sehari-hari. Rasa fanatik ini yang kemudian memunculkan rasa solidaritas yang tinggi pula dikelompok mereka. Sehingga disaat mayoritas anggota mereka libur, mereka melakukan kerusuhan dengan melempari bangunan-bangunan milik etnis Tionghoa dengan batu pada hari Jum'at 24 November 1995.

Faktor ekonomi masyarakat Kota Pekalongan yang melatarbelakangi konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995 adalah adanya pergeseran status pengendali ekonomi yang terjadi pada tahun 1980an. Semula, pada tahun 1950an hingga pertengahan 1970an, di Kota Pekalongan banyak berdiri pabrik mori, diantaranya di Setono, Pringlangu, Buaran, Kedungwuni, dan Pekajangan.

Bahkan pada saat itu, Kota Pekalongan menjadi pusat penghasil mori dan pemasok mori di Jawa.

Pada tahun 1967 dan 1968, pemerintah memberlakukan UU mengenai Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Akibatnya di Kota Pekalongan banyak berdiri industri tekstil printing yang berlatar belakang modal asing dan modal dalam negeri. Hal tersebut berdampak negatif pada perekonomian masyarakat Kota Pekalongan yang mayoritas bermatapencarian industri batik skala kecil. Pada tahun 1987, pengusaha banyak memproduksi batik printing, dan mulai meninggalkan batik tulis. Efeknya lebih besar dirasakan pada tahun 1980an. Produksi batik printing secara massal, membuat pengusaha batik tulis tidak dapat banyak memproduksi dan memasarkannya. Sehingga produksi menumpuk dan perputaran modal terhenti. Keadaan tersebut menyebabkan para pengusaha batik etnis Jawa tersebut terpaksa gulung tikar, dan bekerja sebagai buruh pengusaha etni Tionghoa.

Kondisi di atas menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial antara masyarakat etnis Jawa dengan etnis Tionghoa di Kota Pekalongan. Akibatnya terjadi konflik laten di dalam masyarakat Kota Pekalongan, yang akhirnya muncul kepermukaan pada kerusuhan yang dipicu oleh kasus penyobekan Al Qur'an pada Rabu 22 November 1995. Buktinya para pelaku kerusuhan merupakan masyarakat etnis Jawa kalangan menengah kebawah, dan mereka merusak toko-toko milik etnis Tionghoa.

Faktor sosial masyarakat Kota Pekalongan yang terkenal memiliki sifat yang keras, karena letak geografis Kota Pekalongan yang merupakan daerah pesisir, menyebabkan mereka memiliki tempramen yang tinggi. Kota Pekalongan dikenal sebagai daerah “Sumbu Pendek” atau daerah yang rawan dengan isu-isu SARA. Kesenjangan sosial antara masyarakat etnis Jawa dengan etnis Tionghoa akibat pergeseran status pengendali ekonomi, menyebabkan kecemburuan sosial yang dialami oleh etnis Jawa. Dapat digambarkan kondisi sosial masyarakat Kota Pekalongan pada tahun 1995 adalah etni Tionghoa merupakan orang kaya dan non Muslim, sedangkan etnis Jawa merupakan orang miskin dan Beragama Islam. Hal tersebut kemudian melatarbelakangi konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995, buktinya saat kerusuhan, massa melampiaskan amarahnya pada rumah ibadah yang mayoritas umatnya adalah etnis Tionghoa, yaitu gereja dan vihara.

Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan dipicu oleh seorang etnis Tionghoa yang menyobek Al Qur’an di pinggir Jalan Hayam Wuruk Kota Pekalongan pada Rabu pagi, 22 November 1995. Hal tersebut disaksikan oleh beberapa orang diantaranya adalah Alwi dan Esah yang memberikan keterangannya kepada pihak kepolisian. Belakangan diketahui bahwa pelaku penyobekan merupakan penderita gangguan jiwa yang belum lama keluar dari Rumah Sakit Jiwa. Pelaku penyobekan bernama Yoe Sing Yoeng dan berumur 42 tahun. Al Qur’an yang ia sobek merupakan milik pribadi, yang ia beli di Toko Raja Murah seharga Rp. 3500,-.

Rabu malam, 22 November 1995, sekitar pukul 21.00 WIB, pasca penyobekan, massa yang marah melampiaskannya dengan merusak bangunan

rumah dan toko milik etnis Tionghoa, serta gereja dan vihara. Kerusuhan kembali terjadi pada Kamis 23 November 1995, pukul 10.00 WIB, kali ini yang mejadi sasaran massa adalah Sekolah Masehi. Pada Jum'at 24 November 1995, kerusuhan yang lebih besar terjadi. Setelah melaksanakan Shalat Jum'at, jemaah Jami' Kota Pekalongan melakukan pelemparan batu kepada bangunan-bangunan milik etnis Tionghoa kesegalam arah jalan di Kota Pekalongan, antara lain kea rah Jalan Hayam Wuruk, Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Sudirman, Jalan Wahidin, Jalan KH Mansyur, Jalan Merdeka, dan Jalan Sultan Agung.

Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995 menimbulkan dampak pada kehidupan masyarakat Kota Pekalongan. Dampak tersebut berupa dampak politik, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Dampak politik yang terjadi adalah terjadinya perubahan pada lembaga yang ada didalam masyarakat Kota Pekalongan. Dampak sosial yang ditimbulkan adalah perubahan pada kehidupan sosial masyarakat Kota Pekalongan pasca terjadinya konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995. Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat Kota Pekalongan pasca konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995 adalah kerugian materil dan terganggunya kegiatan perekonomian di Kota Pekalongan.

Konflik Cina-Jawa di kota Pekalongan pada tahun 1995, mencerminkan ketidakharmonisan kehidupan masyarakat antar etnis di Kota Pekalongan. sehingga pemerintah Kota Pekalongan meresmikan lembaga FPBI. FPBI atau Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia diresmikan pada tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 220/046 Tahun 2014. Dalam lembaga tersebut terdapat para tokoh etnis masyarakat di Kota Pekalongan.

Tujuannya adalah apabila terjadi konflik di masyarakat para tokoh tersebut akan segera menyelesaikan konflik, agar tidak membesar dan terjadi konflik besar seperti kasus kerusuhan tahun 1995.

Dampak sosial yang dialami masyarakat Kota Pekalongan adalah munculnya rasa traumatik yang dialami oleh masyarakat etnis Tionghoa. Setelah kejadian penyobekan Al Qur'an yang dilakukan oleh seorang etnis Tionghoa penderita gangguan jiwa, yang kemudian menyebabkan kerusuhan pada tahun 1995, hingga saat ini, masyarakat etnis Tiongho lebih berhati-hati apabila hendak berbicara masalah agama. Hal tersebut karena mereka takut, kerusuhan kembali terjadi dan menjadikan mereka sasaran mauk massa. Selain itu, suasana kota Pekalongan pasca kerusuhan sangat mencekam. Perugas keamanan berpatroli hingga kekampung-kampung. Akibatnya aktivitas masyarakat tidak lagi leluasa seperti sebelumnya. Sebagai contoh, apabila para pemuda hendak melakukan ronda malam dan bertemu dengan petugas, mereka akan langsung dibubarkan.

Dampak ekonomi akibat konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995 adalah kerugian materil. Kerusuhan yang terjadi sejak Rabu 22 November 1995 hingga Jum'at 24 November 1995, mengakibatkan kerusakan pada bangunan-bangunan milik etnis Tionghoa serta gereja dan vihara. Kegiatan perekonomian masyarakat mengalami gangguan, karena para pemilik toko memilih menutup tokonya lebih awal, atau bahkan tidak membuka tokonya. Mereka takut apabila mereka membuka toko, dan kerusuhan kembali terjadi, dagangan mereka akan dirusak oleh massa. Selain itu terjadi pemerasan yang dialami oleh para pemilik toko yang merupakan etnis Tionghoa.

Upaya penanganan dilakukan untuk menangani konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995. Upaya yang dilakukan segera setelah menerima laporan adanya penyobekan Al Qur'an, Rabu 22 November 1995, aparat keamanan langsung ke TKP, Jalan Hayam Wuruk dan langsung mengamankan pelaku dengan membawanya ke Polres Pekalongan. Malamnya pukul 21.00 WIB kerusuhan terjadi, sehingga aparat melakukan penjagaan ketat di daerah tersebut. Pada Kamis 23 November 1995, Sekwilda mengadakan pertemuan dengan para ulama, hasilnya ormas dan para ulama perlu diajak bermusyawarah agar permasalahan tidak semakin membesar. Aparat keamanan dibantu satuan Batalyon 407 Padmakusuma Tegal, melakukan penjagaan ketat dan memblokade jalan agar kerusuhan tidak meluas keluar Kota Pekalongan.

Jum'at 22 November 1995, kerusuhan lebih besar terjadi, jemaah Masjid Jami' Kota Pekalongan melakukan aksi tersebut setelah mereka melakukan Shalat Jum'at. Akibatnya aparat mengamankan beberapa pelaku kerusuhan, dan tokoh masyarakat menghimbau agar masyarakat Kota Pekalongan tidak terpancing emosi. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, para ulama mendesak kepolisian segera menindak pelaku penyobekan Al Qur'an dan membebaskan anggota masyarakat yang masih ditahan, karena dengan dibebaskannya anggota masyarakat tersebut, situasi panas di masyarakat juga akan mereda. Hal tersebut terjadi, karena aksi para pelaku kerusuhan tersebut hanya membela agama mereka yang dilecehkan.

Senin 27 November 1995, setelah dikabarkan Yoe Sing Yoeng meninggal di sel tahanan. Muncul isu baru, yaitu kematian Yoe Sing Yoeng yang disebabkan

oleh penganiayaan oleh napi lain. Namun kabar tersebut dibantah oleh Panglima Yusuf Kertanegara, yang mengatakan Yoe Sing Yoeng ditahan dalam sel tersendiri, dan tidak dicampur dengan tahanan lain. Untuk membuktikan Yoe Sing Yoeng meninggal wajar, aparat keamanan mempersilahkan para ulama dan tokoh masyarakat untuk menyaksikan jenazah Yoe Sing Yoeng sebelum diotopsi di Rumah Sakit Umum Keraton Pekalongan.

Upaya penanganan konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan tahun 1995 juga dilakukan sampai ke akar permasalahan. Agar konflik serupa tidak terulang kembali. Pemerintah Kota Pekalongan berupaya maksimal mengendalikan hubungan masyarakat Kota Pekalongan agar tetap harmonis. Upaya penanganan tersebut mencakup tiga aspek dalam kehidupan masyarakat Kota Pekalongan, yaitu dalam bidang politik, Pemerintah Kota Pekalongan mendirikan lembaga FPBI (Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia) yang didalamnya terdapat para tokoh etnis masyarakat di Kota Pekalongan. Tujuannya adalah apabila terjadi konflik dimasyarakat, para tokoh tersebut dapat segera menyelesaikannya, agar konflik tidak bertambah parah.

Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Kota Pekalongan mendukung dan mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat Kota Pekalongan. Dalam hal ini adalah industri batik dan pariwisata, dengan berkembangnya perekonomian masyarakat Kota Pekalongan, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pekalongan juga meningkat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial didalam masyarakat Kota Pekalongan. Pada bidang sosial, pemerintah Kota Pekalongan mendukung segala aktifitas kelompok etnis masyarakat Kota Pekalongan. Tidak ada larangan

atau pembatasan bagi perayaan-perayaan yang dilakukan oleh kelompok etnis masyarakat di Kota Pekalongan. Hal ini perlu dilakukan agar muncul rasa kecemburuan antar kelompok etnis tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Affandi, Hakimul Ikhwan. 2004. *Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bertrand, Jacques. 2012. *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*. Terjemahan Achmad Munjid. Yogyakarta: Ombak.
- Gottschalk, Louis. 1968. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI-Press.
- Groeneveldt, W.P. *Nusantara Dalam Catatan Tionghoa*. 2009. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Habib, Achmad. 2004. *Konflik Antaretnik Di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina-jawa*. Yogyakarta: LKiS.
- Kantor Statistik BPS Kotamadya Pekalongan. 1995. *Kotamadya Pekalongan Dalam Angka 1995*. Pekalongan.
- Nasikun. 2013. *Sistem Sosial Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Nurhandiantomo. *Konflik-Konflik Sosial Pri-NonPri dan Hukum Keadilan Sosial*. 2004. Surakarta: Muhammadiyah University Perss.
- Nurdiyanto. 2004. *Kerusuhan Di Pekalongan Jawa Tengah 1995-1999*. Yogyakarta: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Nugroho, Fera (ed.). 2004. *Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Poesponegoro, Marwati. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, Turnomo. 2005. *Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness Dalam Komunikasi Antaretnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, Agus. 2006. *Stratifikasi Etnik Kajian Mikro Sosiologi Interaksi Etnik Jawa dan Cina*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suhartono W Pranoto. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supardan, Dadang. 2011. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryadinata, Leo. 2002. *Negara Dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- , 2005. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*. Jakarta: LP3ES.
- Starlita dkk (ed.). *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Orde Baru dan Reformasi*. PT Ichtisar Baru Van Hove dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Wasino. 2006. *Wong Jawa dan Wong Cino: Liku-Liku Hubungan Sosial Antara Etnis Tionghoa Dengan Jawa Di Solo Tahun 1911-1998*. Semarang: Unnes Press.
- Wibowo (ed.). 2010. *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998*. Jakarta: Kompas.
- Wijayakusuma, Hembing. 2005. *Pembantaian Massal 1740: Tragedi Berdarah Angke*. Jakarta: Pustaka Populer Obor.

Jurnal

- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2010 'Dinamika Radikalisme dan Konflik Bersentimen Keagamaan di Surakarta'. Dalam *Studia Philosophica et Theologica*. No. 2. Hal. 258-287.
- Coppel, Charles. 2003 'Kendala-Kendala Sejarah Dalam Penerimaan Etnis Cina di Indonesia yang Multikulturak'. Dalam *Antropologi Indonesia*. No. 71. Hal. 13-22.
- Lubis, Zulkifli B. 2005 'Kanalisis Ketegangan etnis dan Kompetisi Budaya dalam Sektor Publik'. Dalam *Etnovisi*. No. 1. Hal. 61-71.
- Muntholib, Abdul. 2008 'Melacak Akar Rasialisme Di Indonesia Dalam Perspektif Historis'. Dalam *Farum Ilmu Sosial*. No. 2. Hal. 104-112.
- Pelly, Usman. 1999 'Akar Kerusuhan Etnis di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi'. Dalam *Antropologi Indoneisa*. No. 58. Hal. 27-35.
- Rahardjo, Turmono. 2005 'Kebijakan Pemerintah Tentang Etnis Cina'. Dalam *JIAKP*. No. 2. Hal. 780-802.
- Retno, Yunita. 2013 'Asimilasi Versus Integrasi: Reaksi Kebijakan Ganti Nama WNI (Warga Negara Indonesia) Tionghoa 1959-1968'. Dalam *Avatara*. No. 2. Hal. 35-41.
- Suparlan, Parsudi. 2003 'Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina dalam Masyarakat Majemuk Indonesia'. Dalam *Antropologi Indonesia*. No. 71. Hal. 23-33.
- Suryadinata, Leo. 2003 'Kebijakan Negara Indonesia Terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi Ke Multikulturalisme?'. Dalam *Antropologi Indonesia*. No. 71. Hal. 1-12.

Syarifuddin, Achmad Fedyani. 2006 'Membumikan Multikulturalisme di Indonesia'. Dalam *Etnovisi*. No. 1. Hal. 3-11.

Skripsi

Hermana, Hena Gian. 2015. 'Kerusuhan Anti Etnis Tionghoa di Jatiwangi Februari 1998 (Sebuah Tinjauan Historis)'. *Skripsi*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Laporan Penelitian

Hayati, Chusnul. 'Pekalongan Sebagai Kota Batik 1950-2007'. *Laporan Penelitian*. Semarang: Jurusan Sejarah FIB UNDIP.

Artikel

Danius, Ebin E. 'Hubungan Kristen Islam Pasca Konflik DI Tobelo Halmahera Utara'. *Artikel*.

Soehadha, Moh. 'Kekerasan Kolektif dan Dialog Kebudayaan: Belajar dari Pengalaman Kekerasan Menjelang Reformasi di Indonesia'. *Artikel*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Sujatmiko, Iwan Gardono. 'Konflik dan Keadilan Sosial'. *Artikel*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Makalah

Dharmawan, Arya Hadi. 2006 'Konflik Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)'. *Makalah* disajikan dalam Seminar PERAGI 10-11 Januari.

Arsip dan Dokumen

Laporan Kantor Sosial-Politik Tahun 1967-1996.

Daftar Ganti Nama Periode Tahun 1961-1990.

Berita Acara Pemeriksaan M. Alwi 1995.

Berita Acara Pemeriksaan Esah 1995.

Berita Acara Pemeriksaan Tomy Yuwono 1995.

Berita Acara Pemeriksaan Sucianti 1995.

Keterangan Sakit Jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Magelang.

Surat Kantor Pembantu Gubernur Jawa Tengah Untuk Wilayah Pekalongan.

Laporan Situasi Daerah Bulan November 1995.

Laporan Departemen Agama Kodya Pekalongan Tahun 1995.

Surat Kabar

Suara Merdeka. 1995a. *Kasdam Imbau Masyarakat Jangan Terpancing Kerusuhan di Pekalongan*. 277. 24 Nov. Hal. 1 dan 19.

-----, 1995b. *Gubernur: Situasi Daerah di Pekalongan Sudah Normal Tapi Jangan Lengah*. 278. 25 Nov. Hal. 1 dan 16.

-----, 1995c. *Danrem Bantah Ada Korban Jiwa Dalam Kerusuhan di Pekalongan*. 279. 26 Nov. Hal. 15.

-----, 1995d. *Sebelas Perusuh di Pekalongan Masih Diperiksa Aparat Keamanan*. 280. 27 Nov. Hal. 1 dan 19.

-----, 1995e. *Kerusuhan di Pekalongan: Sebagian Pelaku Hanya Ikut-Ikutan*. 281. 28 Nov. Hal. 1 dan 15.

-----, 1995. *Penyobek Al Qur'an Meninggal di Tahanan*. 282. 29 Nov. Hal. 1 dan 15.

-----, 1995f. *Upacara Kremasi Dijaga Ketat: MUI Yakinkan Penyobek Al Qur'an Meninggal*. 283. 30 Nov. Hal. 1 dan 15.

-----, 1995g. *Buntut Kerusuhan di Pekalongan: Ada Pemerasan Terhadap Pemilik Toko*. 285. 2 Des. Hal. 1 dan 15.

-----, 1995h. *Komnas HAM Segera Usut Kerusuhan di Pekalongan*. 286. 3 Des. Hal. 1 dan 15.

Suara Merdeka. 1995i. *Laskar Ampera Laporkan Kasus Pekalongan ke Wakil Presiden*. 289. 6 Des. Hal. 1 dan 15.

-----, 1995j. *Tentang "Kasus Pekalongan": Ada Kerusuhan, Ada Pelanggaran HAM*. 291. 8 Des. Hal. 20.

-----, 1995k. *Muladi: Komnas HAM Akan Meneliti Pemicu Kerusuhan di Pekalongan*. 292. 9 Des. Hal. 1.

-----, 1995l. *Tanpa Data Lengkap, Tak Mungkin Komnas HAM Tangani Kasus Pekalongan*. 294. 11 Des. Hal. 1.

Internet

Gatra. 1995a. "Badai" Yoe Telah Berlalu. 9 Desember. apakabar@access.digex.net. (3 Maret 2016).

-----, 1995b. *Rusuh Gara-Gara Orang Gila*. 2 Desember. apakabar@access.digex.net. (3 Maret 2016).

Republika Online. 1995. *Kerusuhan di Pekalongan: Ulama Imbau Masyarakat Sabar*. 27 November. apakabar@access.digex.net. (3 Maret 2016).

Kesbangpol Kota Pekalongan. 2015. *Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Pekalongan*. <http://www.kesbangpol-pekalongankota.org>. (3 Maret 2016).